



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
DAN KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : III (tiga)
Rapat Ke : 18
Jenis Rapat : Raker
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 9 Februari 2021
Waktu : 10.15-13.30 WIB
Tempat : Kantor/Rumah masing-masing (rapat secara virtual)
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Acara : Membahas Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021 sesuai Surat Menkeu Nomor S-30 MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy/Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI
- Hadir : **A. Anggota DPR RI:**
44 dari 54 Anggota Komisi IV dengan rincian:
- 1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)**
9 dari 12 orang Anggota
 1. Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI)
 2. Riezky Aprilia, S.H., M.H.
 3. H. Sunarna, S.E., M.Hum.
 4. Ir. Mindo Sianipar
 5. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
 6. Vita Ervina, S.E., M.B.A.
 7. Drs. I Made Urip, M.Si.
 8. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
 9. Maria Lestari, S.Pd.
 - 2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)**
4 dari 8 orang Anggota
 1. H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)

2. Ir. Ichsan Firdaus
 3. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.
 4. Alien Mus, S.H.
- 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)**
6 dari 7 orang Anggota
1. Ir. KRT. H. Dadori Wonodipuro, M.M.
 2. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
 3. Renny Astuti, S.H., S.PN.
 4. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess., M.Sc.
 5. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
 6. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.
- 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)**
6 dari 6 orang Anggota
1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
 2. H. Charles Meikyansah
 3. Yessy Melani, S.E.
 4. H. Sulaeman L Hamzah
 5. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
 6. Julie Sutrisno
- 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)**
6 dari 6 orang Anggota
1. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
 2. H. Muhtarom, S.Sos.
 3. Daniel Johan, S.E.
 4. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
 5. Edward Tanur, S.H.
 6. H. Irawan, S.Sos., M.M.
- 6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)**
4 dari 5 orang Anggota
1. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 2. Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
 3. Bambang, S.ST., M.H.
- 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)**
5 dari 5 orang Anggota
1. drh. H. Slamet
 2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 3. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
 4. H. Johan Rosihan, S.T.
 5. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.
- 8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)**
3 dari 4 orang Anggota

1. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
2. Haerudin, S.Ag., M.H.
3. Slamet Ariyadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. Ema Umiyyatul Chusnah

B. Pemerintah:

1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Ir. Laksmi Wijayanti, M.C.P. (Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
4. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
5. Ir. Helmi Basalamah, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
6. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan);
9. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.S.D. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
10. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

12. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Ir. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
14. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
15. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);
16. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani);
17. Ir. Agus Setya Prastawa, M.B.A. (Direktur Utama PT Inhutani I);
18. Ir. Sangudi Muhammad, M.M. (Direktur utama PT Inhutani II);
19. B. M. Setio Baskoro (Direktur Utama PT Inhutani III);
20. Ir. Andi Purwadi, M.M. (Direktur Utama PT Inhutani IV); dan
21. Ir. Bakhrizal Bakri, M.M. (Direktur Utama PT Inhutani V).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya,
Yang terhormat Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove,
Yang terhormat Direktur Utama Perum Perhutani,
Yang terhormat Direktur Utama PT Inhutani I sampai dengan V,
Serta hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya dapat mengadakan Rapat Kerja ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI, Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tanggal 3 Desember 2020 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI tanggal 12 Januari 2021, pada hari ini Selasa tanggal 9 Februari 2021, Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka membahas refocusing dan realokasi belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, Rapat Kerja hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.15 WIB)

Rapat Kerja hari ini kita mulai pada pukul 10.15 WIB dan akan diakhiri pada pukul jam 13.30 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 Ayat (2) Peraturan Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama, dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kesimpulan Rapat;
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Tahun 2021 adalah tahun yang penuh dengan tantangan, yang mana Indonesia harus melakukan 2 pekerjaan besar sekaligus, yaitu melakukan vaksinasi covid-19 secara nasional serta meningkatkan ekonomi nasional agar dapat membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat yang saat ini kehilangan pekerjaan akibat dampak pandemi COVID-19.

Dalam hal ini Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan prioritas kegiatan tahun 2021, sebagai berikut:

1. Peningkatan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program yang memberikan akses pemanfaatan hasil hutan kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan;
2. Pelaksanaan tugas pokok menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup; serta
3. Mengelola dan melestarikan hutan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penjelasan secara garis besar mengenai strategi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan tersebut.

1. Rehabilitasi hutan dan lahan termasuk rehabilitasi ekosistem gambut, mangrove dengan terus melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk didalamnya Kementerian Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota.
2. Penguatan kawasan hutan mulai dari proses penunjukan penataan batas, pemetaan, penetapan kawasan hutan, sebagai tindak lanjut pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Percepatan target penyelesaian seluruh kasus hukum, terutama kasus yang sudah inkrah saat ini, nilai ganti rugi 19,3 triliun dan berpotensi akan terus meningkat jumlahnya seiring dengan pelaksanaan tugas penegakan hukum atau kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Penyelesaian kewajiban seluruh pemegang ijin usaha dalam kawasan hutan serta memberikan sanksi kepada pemegang ijin yang terbukti lalai melaksanakan kewajibannya, mulai dari pengenaan sanksi administrasi sampai dengan pencabutan ijin sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
5. Pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistem termasuk di dalamnya pengembangan wisata alam di dalam kawasan konservasi yang berpotensi meningkatkan penerimaan negara bukan pajak.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI dalam kesempatan Rapat Kerja hari ini meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta memberikan penjelasan mengenai urgensi peningkatan kuantitas dan kualitas

sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas penjagaan kawasan hutan serta pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Terkait hal itu, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengajukan penambahan jumlah Polisi Hutan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara.

Bapak dan Ibu, saya miris mendengarnya kemarin ada harimau yang lepas dari kebun binatang di Singkawang. Kenapa bisa terjadi? karena ini kelalaian pengelola. Kalau kelalaian pengolah harus diberikan sanksi, jangan seolah-olah beginilah-begitulah. Saya nggak mau terjadi lagi seperti itu, jadi kalau seperti itu mereka seenaknya saja tidak akan bertanggungjawab. Kelalaian itu harus diberikan sanksi. Kemudian tadi dalam sambutan saya, saya mengatakan meminta penambahan Polhut. Saya belum pernah mendengar Polisi Hutan menangkap yang membawa binatang atau burung atau apapun juga nyebrang dari Sumatera ke Jawa. Selalu yang menangkap adalah Karantina Pertanian. Coba dipikirkan ini, kenapa sih tidak ada sinergi antara Kementerian Kehutanan dan Pertanian untuk menjaga pintu keluar, karena terutama di Bakauheni itu setiap bulan setiap, setiap bulan minimal dua kali penangkapan. Setelah ditangkap baru diserahkan sama BKSDA. Harusnya ada dong di pelabuhan apalagi di Bakauheni itu pelabuhan termasuk pelabuhan tersibuk di dunia. Nggak pernah yang nama Polisi Kehutanan itu nangkap, seolah-olah bukan tugasnya dia.

Bapak dan Ibu yang saya muliakan.

Demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan penjelasan terkait Rapat Kerja hari ini.

Silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Memastikan bahwa kesepakatan mungkin Ibu Menteri diberi waktu 10 menit mengingat agenda juga hari ini Pimpinan. Ijin Pimpinan, mengingatkan saja.

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri, jadi kami hari ini cukup padat, karena besok adalah tutup masa sidang. Setelah ini kami Pimpinan ada rapat dengan Pimpinan DPR RI, kemudian jam 14.00 WIB kami ada Rapat Kerja dengan Kementerian Kelautan. Karena waktunya sangat pendek kita buat efisien tapi tetap bermanfaat dan berguna.

Silakan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih Ketua.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI.

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI. Ijinkan kami melaporkan tentang refocusing dengan realokasi belanja KLHK. Bapak Pimpinan dan Ibu-Bapak Anggota, saya mohon maaf Pak Wamen tidak bisa hadir karena menggantikan kami di rapat bersama Bapak Presiden.

Terkait dengan refocusing anggaran untuk 2021, sebagaimana tindak lanjut dari Rapat Kerja tanggal 1 Februari 2021 dan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 5 Februari 2021, sesuai undangan dan catatan yang terhormat Ketua. Pada *screen* 5 mohon ijin kami melaporkan pada *screen* 5 tentang konfigurasi awal dan proyeksi refocusing dengan penghematan dana Rp519 miliar sebagaimana surat dari Menteri Keuangan RI, seperti yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Ketua.

Kalau kita lihat datanya untuk 14 unit Eselon I Pagu Alokasi 2021 adalah Rp7,957 triliun lebih menjadi dengan penghematan Rp519,3 miliar menjadi Rp7,437 triliun. Tetapi kami laporkan terdahulu bahwa dalam konfigurasi anggran itu ada belanja pegawai dan belanja operasional dan ada belanja non operasional, yaitu sebesar Rp4,646 triliun pada *screen* 8. Menurut konfigurasi ini terdapat prioritas nasional sebesar Rp3,45 triliun dan prioritas bidang Rp1,182 triliun.

Bapak Pimpinan dan Ibu-Bapak Anggota yang saya hormati.

Seperti yang lalu pernah kami laporkan juga di *screen* 9, tema fokus dan strategi pada tahun 2021 temanya mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Tadi disampaikan oleh yang terhormat Ketua sebagai pengantar bahwa ada fokus pemulihan ekonomi dan sekaligus persoalan penanganan COVID. Kemudian ada juga prioritas nasional, yaitu pada 7 prioritas nasional dimana KLHK mendapatkan perintah pada tiga prioritas nasional, yaitu dalam ketahanan nasional pertama yang memperkuat ketahanan ekonomi, kemudian yang kedua pengembangan wilayah untuk

mengatasi kesenjangan dan menjamin pemerataan, serta prioritas nasional tiga menyangkut sumber daya manusia dan berdaya saing yang berkualitas dan berdaya saing.

Di *screen* berikutnya pada halaman 10 juga telah kami laporkan terdahulu pada prioritas nasional pertama untuk KLHK dananya Rp516 miliar dengan program prioritas terkait dengan peningkatan kuantitas dan ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil. Pada Prioritas Nasional kedua pada *screen* berikut, Rp37 miliar berkenaan dengan pengembangan wilayah. Dalam hal ini di Kalimantan untuk mengatasi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pada Prioritas Nasional ketiga berkaitan dengan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing, yaitu pada program prioritas pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktivitas dan daya saing pada *screen* 12.

Pada Prioritas Nasional keenam berkaitan dengan membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, yaitu pada program prioritas pencegahan, pencemaran, dan kerusakan, penanggulangan pencemaran pemulihan, serta penguatan kelembagaan dan penanggulangan bencana, serta ketahanan iklim dan juga dalam hal menyangkut regulasi dan kebijakan terkait dengan perubahan iklim dan penanganan pembangunan, pengendalian pembangunan, pengendalian karbon dalam pembangunan.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang saya hormati.

Di dalam *screen* 14 tercermin konfigurasi anggaran yang berbasis masyarakat, yaitu berkenaan dengan fasilitas pembinaan UMKM, Bakti Rimbawan, kebun bibit dan bibit produktif, kemitraan konservasi, usaha ekonomi produktif di kawasan konservasi, pemulihan ekosistem bersama rakyat, pengembangan kelompok tani hutan, pengembangan lembaga pelatihan pemagangan usaha kehutanan, Bank Pesona, pengelolaan emas bebas merkuri, fasilitas limbah B3, sumber energi alternatif, layanan kesehatan, Bank Sampah Induk, pengembangan budidaya maggot, pusat daur ulang dan rumah kompos, demikian pula pemulihan kerusakan lapisan ozon terbuka, pembangunan sumur bor, sekat kanal, revitalisasi ekonomi dan pemeliharaan demplot vegetasi.

Bapak dan Ibu Pimpinan yang kami hormati.

Saya ingin melaporkan sebagaimana tadi arahan Pak Ketua, bahwa sebanyak-banyaknya program untuk masyarakat. Kami sedang menelusuri untuk bisa menambah kegiatan-kegiatan di luar yang 667 ini yang bisa langsung pada masyarakat. Dan nanti kami akan bersama-sama yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota untuk seperti waktu yang lalu mendorong pengetahuan, berada di lapangan dan menstimulir masyarakat. Jadi kita sedang didalami lagi supaya di bulan Februari, Maret, April ini sudah mulai dikerjakan di lapangan.

Pada akhirnya Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati. Kami mohon persetujuan dan dukungan atas konfigurasi baru dengan Pagu refocusing KLHK untuk 2021 setelah penghematan, yaitu sebagai berikut, pada *screen* 16:

1. Sekjen Rp528.105.633.000,00
2. Inspektorat Jenderal Rp71.381.398.000,00
3. PHPL Rp322.261.593.000,00
4. PDASHL Rp2.008.333.560.000,00
5. Ditjen KSDAE Rp1.769.870.792.000,00
6. Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Rp395.384.387.000,00
7. BLI Rp311.186.938.000,00
8. BP2SDM Rp296.365.515.000,00
9. Ditjen PSKL untuk perhutanan sosial Rp346.458.362.000,00
10. Gakkum Rp324.435.771.000,00
11. Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Rp282.209.106.000,00
12. Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Rp244.262.243.000,00
13. Pendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Rp232.695.285.000,00
14. Badan Restorasi Gambut Rp304.785.675.000,00

Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Kami menyimak dengan baik dan mencatat dan menjadikan pandangan-pandangan Pimpinan tadi sebagaimana disampaikan Ketua untuk menjadi pedoman kerja bagi pelaksanaan.

Terima kasih, kurang lebih mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas penjelasan-penjelasanannya.

Sebelum ke Anggota saya mau tanya masalah yang di Singkawang itu gimana Ibu Menteri. Siapa yang akan menjawab.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Kami sudah memantau kejadian hari Sabtu itu. Jadi ada kelalaian LK, saya sesuai tadi juga pandangan yang terhormat Ketua, bahwa saya meminta segera dievaluasi menyeluruh dan dikenakan sanksi. Jadi memang ada kelalaian saat memberi makan, kemudian lepas itu Harimau Benggala. Kemudian Polisi yang menangani pertama kali, lalu harimau satunya sulit ditangani dengan tembak bius, akhirnya ditembak mati satu. Kemudian harimau yang kedua kemudian ditangani oleh Polisi bersama Balai dan bisa ditembak bius. Jadi proses yang kami ikuti sampai situ Ketua dan evaluasi sedang dilakukan dan kita akan dikenakan sanksi.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Dalam perjanjian pinjam tersebut apakah apabila terjadi kelalaian bukan hanya kena evaluasi, paling tidak harus kena denda setinggi-tingginya. Misalnya kalau harimau mati paling harus ganti rugi Rp5 miliar, kalau kamu mau boleh enggak mau ya sudah. Kalau enggak begitu semuanya seenak-enaknya ini. Kalau perlu ditutup dulu sementara sambil evaluasi. Jadi dalam perjanjian pinjam pakai itu tidak ada sanksi denda Ibu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ada Ketua.

KETUA RAPAT:

Berapa nilainya?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Angkanya cuma Rp100 juta Ketua.

KETUA RAPAT:

Kalau Rp100 juta mending saya nanti pinjam pakai saja. Saya pinjam terus saya bilang mati, terus saya offset terus saya jual keluar negeri. Kenapa enggak setinggi-tingginya Pak Dirjen Rp5 miliar biar tahu rasa. Karena kalau hanya Rp100 juta yang namanya kelalaian saya bayarlah, tapi kalau Rp5 miliar mereka akan lebih fokus, akan lebih waspada dan akan lebih jeli dalam menjaga kandang.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya Kanjeng.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Jadi begini usul Bapak Ketua itu bagus, tapi kita untuk bekerja berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undangnya seperti tadi disampaikan Bapak Dirjen, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 yang sudah 20 tahun, itu diusulkan. Jadi kita kalau seperti Bapak memang bagus kesana arahnya nanti, cuman sekarang Undang-Undang belum seperti itu.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Justru kan kami Komisi IV DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang, tapi nampaknya Kementerian Lingkungan Hidup agak keberatan. Padahal larinya tadi yang saya katakan itu, karena mohon maaf kalau sanksinya ringan ya tinggal saya bayar saja Rp100 juta nggak ada artinya. Tetapi berapa banyak kita punya binatang langka yang harus dilindungi.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Anggota Komisi IV DPR RI untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya. Siapa duluan?

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Ibu Hajah Endang Setiawati, kami persilahkan dengan tidak mengurangi rasa hormat 3 menit.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirahim.

Pertanyaan dan masukan dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, dikatakan oleh Endang hasil dari komunikasi dan diikuti seluruh Anggota Fraksi Partai Gerindra.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Salom,
Om Swasti Astu,
Namo buddhaya,
Salam Indonesia Raya.*

Yang terhormat Ibu Pimpinan dan Bapak Pimpinan, Anggota Komisi IV DPR RI,
Serta Ibu Menteri KLHK dan jajarannya yang saya banggakan.

Mewakili Fraksi Partai Gerindra ijinkan kami menyampaikan ringkasan tanggapan dan pertanyaan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi kami, yaitu ada 22 tapi nanti saya singkat saja karena waktunya hanya 3 menit. Jadi kami minta penjelasan atas pengurangan anggaran 35% untuk kegiatan pada area terbuka di kawasan konservasi yang merupakan program prioritas nasional. Kami memandang bahwa di masa pandemi ini kita justru harus meningkatkan perhatian terhadap areal-areal konservasi kita, baik pada TSL yang hidup di dalamnya juga lahan-lahan kritis yang berada di dalam kawasan. Di mana saja lokasi kegiatan itu perlu Ibu Menteri jelaskan.

Dan mohon perhatian lokasi open area yang merupakan habitat satwa liar di beberapa taman nasional, seperti halnya Taman Nasional Tesso Nilo di Riau habitat rusak akibat illegal logging dan konsersi untuk perkebunan.

Kemudian Taman Nasional Baluran Jawa Timur, yang habitat bantengnya menyusut akibat invasi spesies. Dan juga ada inventarisasi habitat kritis di berbagai kawasan konservasi. Nah, apakah program kegiatan pada area terbuka ini sudah didasarkan pada habitat dari 25 spesies satwa yang terancam punah. Dan prioritas-prioritas yang dibuat sendiri oleh KLHK.

Yang kedua, kami sangat mendukung peningkatan anggaran rehab hutan dan lahan kritis di kawasan hutan. Peningkatan 146% untuk rehabilitasi hutan dan lahan kritis di IKN dan DAS, kami harapkan berfokus pada rehab hutan dan lahan kritis terpadat, bukan untuk percepatan pembangunan ibu kota negara. Karena saat ini lebih membutuhkan percepatan penanganan hutan dan lahan kritis terpadat. Nah, program rehab biasanya dilaporkan berapa luasan area yang telah ditanam, tapi jarang kita mendengar berapa persen bibit tanaman itu berhasil tumbuh sampai dewasa dan berapa jumlah bibit yang mati setiap tahunnya. Padahal program rehab hutan yang menunjukkan keberhasilan adalah berupa bibit tanaman yang berhasil hidup sampai dewasa. Berapa hektar yang bertambah tutupan lahannya. Jadi mohon dalam program rehabilitasi dimasukkan juga evaluasi hasilnya, kalau perlu setiap tahunnya dilaporkan.

Yang ketiga, bagaimana prioritas KLHK dalam menangani bencana hidrolgis dengan adanya alih fungsi lahan, sedimentasi sungai akibat musim penghijauan dan mengakibatkan bencana longsor dan banjir besar, di antaranya di DAS Ciliwung, Citarum, DAS Barito dan DAS di Maluku Utara dan di Sulawesi Utara.

Yang keempat, kami temukan ada peningkatan anggaran 31% untuk sistem data dan informasi data. Nah, kami mohon alokasinya dan mohon ada program evaluasi tingkat keberhasilan rehabilitasi, penambahan luas berapa persen tutupan lahan, tidak hanya laporan keberhasilan jumlah bibit yang ditanam saja.

Kelima, bagaimana strategi dan rencana rehab hutan dan lahan kritis yang dilakukan KLHK terkait dengan sampah-sampah plastik yang dibuang ke sungai, sehingga menimbulkan aliran sungai tidak lancar. mohon dibuat target capaian sungai-sungai mana yang diprioritaskan bebas sampah. Dan bagaimana mekanisme penanganan sampah di sungai-sungai bekerja sama dengan Pemda setempat dan *stake holder* lainnya. Program bantuan berupa KBR bibit produktif dan program Bank Pesona yang tadi telah dikemukakan tentu saja tidak akan berhasil dengan baik, karena adanya banjir dan pada musim panas mengakibatkan tanaman menjadi kering dan mati. Nah, apa langkah-langkah yang diambil oleh KLHK. Kami minta penjelasan atas mekanisme penyelenggaraan konferensi Minamata, apakah masih memerlukan anggaran yang sama mengingat pandemi yang masih berlangsung. Apakah tidak bisa dilakukan lebih efisien lagi, karena dalam beberapa hari terakhir kami melihat tayangan di TV maraknya pembuangan sampah plastik dan tumpukan.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Cukup ya Ibu Endang.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.):

Baik Pak.

Berikutnya masih banyak dan saya sudah tulis dengan rinci. Mohon kesediaan Ibu Menteri dan jajarannya bisa menjawab dengan baik dan menulis jawaban kami untuk diedarkan kepada para Anggota Komisi IV DPR RI.

Demikian Pak Ketua dan Ibu Ketua.

*Billahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Mau diserahkan sendiri, oh nanti saja.

Silakan Mas Guntur.

F-PD (Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.):

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semuanya.*

Yang saya hormati Ketua, Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang saya hormati Ibu Menteri dan segenap jajarannya.

Fraksi Demokrat memberikan saran dan pendapat sebagai berikut. Peran dan tanggung jawab KLHK untuk mengelola hutan dan lingkungan hidup di wilayah kesatuan negara kita sangatlah besar dengan segala kekayaan dan permasalahan yang ada di dalamnya. Seperti akhir-akhir ini kita melihat bencana alam yang bertubi-tubi sangat memprihatinkan bangsa kita semua. Tugas besar KLHK harus ditunjang pula dengan anggaran yang besar, sayangnya anggaran di KLHK yang sudah kecil Rp7,95 triliun harus pula dihemat menjadi Rp7,43 triliun. Dengan anggaran terbatas tersebut kami memohon KLHK dalam upaya pencapaian program yang ditetapkan agar fokus. Kami Fraksi Demokrat sangat mendukung apa yang disampaikan pidato Ibu Menteri tadi bahwa kami lebih mengutamakan kepada sektor pemberdayaan masyarakat pada saat-saat kita mengalami hutan. Sekali lagi kami sangat mendukung kebijakan Ibu.

Yang kedua, kegiatan yang ditargetkan dalam program prioritas nasional pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana iklim dan lain sebagainya. Dari penghematan anggaran di tubuh KLHK sebesar Rp519,3 miliar. Kami melihat penghematan yang terbesar adalah di sektor pengelolaan hutan berkelanjutan, yakni 324 miliar 67% dari nilai penghematan. Kami mohon ini merupakan hal yang sangat kontradiktif dengan tujuan yang ada untuk penjelasannya. Partai Demokrat meminta agar KLHK mengedepankan prinsip kehati-hatian di dalam rangka perpanjangan ijin pinjam pakai kawasan hutan. Pemberian harus berdasarkan pada angka kebutuhan saja. Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi atau dengan sengaja tidak membayar wajib PNPB PKH kepada negara saya saran dan Fraksi Demokrat menyarankan untuk dengan tegas dicabut.

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Menindaklanjuti hasil kunjungan kerja belakangan ini, di Jambi terdapat sejumlah areal hutan yang dikuasai oleh PT Sinarmas. Yang jadi masalah masyarakat dikendalikan harus menanam tanaman untuk bahan baku kertas, walaupun itu tanahnya sendiri dan telah berganti, seharusnya masyarakat berdaulat atas tanahnya. Kenapa ini masih juga terjadi sampai dengan sekarang. Kami Komisi IV DPR RI sudah dua kali melaksanakan kunjungan tersebut, bahkan dari pihak Ibu juga belum memberikan suatu hasil dari pada sampel yang disanggihkan kepada kami. Kiranya untuk itu, sampel-sampel yang berkaitan dengan aliran sungai dan lain sebagainya, karena aliran sungai ini menjadi mata pencaharian penduduk dan ikannya akhirnya menjadi tidak ada, kami sangat prihatin dengan hal tersebut. Mohon kiranya tindakan-tindakan seperti ini ada tindak lanjut. Jangan hanya kita datang sekali kesanggupan-kesanggupan, kemudian kita ada efeknya sama sekali.

Yang kedua, kita juga melihat kemarin di Desa Bangun Mojokerto juga banyak kita temukan janji-janjian dari Pemerintah Daerah dari KLHK untuk perbaikan tapi sampai dengan sekarang tumpukan-tumpukan limbah tetap menggunung apalagi dalam kondisi hujan yang seperti ini. Mohon hal-hal seperti ini mendapat tindak lanjut yang lebih konkrit. Saran kami apakah ini hanya menertibkan ke dalam saja atau kurang mengadakan akomodasi dengan pihak-pihak keamanan setempat, pihak-pihak Pemerintah Daerah dan lain sebagainya. Kemarin ada perjanjian membangun tempat sampah, membangun lantai sampah, membangun rumah dan lain sebagainya. Namun yang ada sekarang tetap seperti keadaan kami waktu itu berkunjung ke sana.

Yang ketiga, kami juga mengunjungi di Jombang ada limbah alumunium yang oleh pabrik-pabrik diwujudkan jalan dan ini memang terlihat untuk mensejahterakan penduduk. Namun riil dari limbah-limbah itu hujan sangat memberikan pengaruh efek yang kurang baik. Bahkan ada kebijakan terakhir saya menyampaikan terima kasih dari 116 pabrik yang ada di desa itu, 4 sudah mendapatkan suatu perhatian dari KLHK, tetapi justru 113 yang besar-besar belum mendapat sentuhan. Mereka sekarang komplain kenapa hanya 4 itu saja yang mendapatkan suatu perhatian. Itu saja Ibu Menteri kami sampaikan.

Terima kasih atas perhatiannya.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Saya minta apa yang dikatakan oleh Jenderal tersebut dijawab. Dan kalau memang perusahaan-perusahaan tersebut bermasalah berikan sanksi, kalau perlu tutup sementara. Termasuk juga penyerobotan lahan tadi, termasuk juga yang di Jombang tadi. Kalau bukan kita siapa lagi untuk bertindak, yang penting kita tidak menyalahi peraturan dan Undang-Undang, tetapi kalau perusahaan tersebut menyalahi tindak. Ya Pak Roy, saya minta jangan tebang pilih ini, saya ingatkan jangan tebang pilih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Edward Tannur, NTT, Surabaya.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Baik, terima kasih.

Pimpinan Komisi IV DPR RI beserta Anggota, Ibu Menteri beserta jajarannya.

Jadi saya tidak membaca pandangan atau ulasan dari Fraksi. Saya langsung *highlight* saja supaya singkat, sesuai anjuran Pak Ketua. Jangan sampai saya lagi seru-serunya ngomong distop, saya singkat memang sudah *highlight* saja, karena saya tahu suasana kebatinan Ketua ini cocok dengan saya, saya juga ngomong singkat saja, tidak mau panjang lebar.

Juga adi begini Bu, kejadian sekarang inikan banjir, tanah longsor, macam-macam, gagal panen. Itu saya kira akibatnya satu mungkin El Nino, El Nino pergi El Nina datang, Jadi kita repot, El Nino datang juga kita marah, ini memang perlu penyesuaian. Dan juga kalau saya lihat banjir yang terjadi, longsor yang terjadi akibat salah satunya penggundulan hutan.

Dua, banjir itu terjadi penyempitan aliran sungai, pendangkalan. Dan yang tidak kalah penting ini air lautnya naik. Jadi airnya mau ke mana, ke laut tapi lautnya tolak, ke daratan ya banjir. Jadi airnya ini kita tidak bisa pungkiri ini anomali iklim, jadi kita jangan salahkan hanya hutan saja. Ini salah manusia juga, salah yang kasih air turun juga terlalu banyak, mau bagaimana sekarang. Saya apresiasi Bu memang KLHK ini berat Kementerian ini, sama pertanian itu berat. Kita pasti ada kekurangan, kalau kita tidak ada kekurangannya ya Allah saja yang tidak ada kekurangan. Jadi saya apresiasi Ibu masih bertahan di KLHK, saya dengar nama Ibu sudah periode yang lalu Pak Jokowi masih mempertahankan Ibu, jadi ini prestasi.

Jadi begini Bu, yang Ibu berikan program bantuan itu sudah bagus, hanya waktunya yang tidak tepat. Suruh kita tanam akan tetapi musim panas

ini gimana ini. jadi tolong siklusnya di atur, supaya pas musim hujan kita tanam. Saya terus terang jujur Ibu, anakan yang Ibu kasih itu tanamnya bulan Oktober puncak musim panas. Saya marah, saya bilang baik dari petugas kehutanan atau lingkungan tolak saja, bilang ini nggak bisa tanam, tanam di tanah kering kerontang ini, ini teknologi Arab atau teknologi mana lagi nih. Jadi jangan dari pada sia-sia Ibu, 20.000 anakan ini saya sedih. Saya Anggota DPR, saya ini mulut, telinga, otak, hati, masyarakat, jadi saya ngomong ini bukan karena bilang kasih program bantuan saya hambur saja, jangan kita malu. Jadi seperti Ibu itu, itu menyangkut bantuan-bantuan tolong supaya disesuaikan dengan iklim yang ada.

Saya senang Ibu omong bilang bahwa sesuai anjuran Pak Ketua, bantuan-bantuan itu difokuskan pada yang menyentuh langsung pada rakyat. Bagus saya senang itu dukungan saya penuh terhadap Ibu. Karena kalau kita nggak bantu manusia masa mau bantu kuda, nggak mungkin, harus manusianya dulu yang didahulukan. Dan tadi sudah Pak Ketua sampaikan bahwa petugas hutan itu harus diperbanyak, karena sekarang orang jahat dan orang baik ini kita sulit bedakan. Jadi maling juga banyak, yang jaga juga kurang, ini mau gimana ini. Jadi itu perlu diperhatikan lagi mengenai Polisi Hutan itu, tolong.

Dan satu lagi Ibu, kalau bisa kami NTT di kasih sumur juga lah, masa semua di Kalimantan habis. Kami kekeringan setengah mati, itu ada hubungannya antara hutan dan sumur, hutan penghasil air, air penghasil hutan, korelasi ada. Kita dikasih anakan mau siram pakai ini, airnya banyak sumber daya air itu ada di hutan. Jadi tolonglah saya sudah minta dari periode yang lalu sebelum saya ke Komisi II DPR RI sekarang suruh kembali lagi. Jadi itu saya mohon supaya tolong sumur jangan banyak-banyak, satu tahun kasih 100 biji saja sudah terima kasih banyak. Karena kita omong reboisasi, omong hutan, air tidak ada. Jadi itu perlu Ibu Menteri catat bahwa ini keluhan kami, tolong satu tahun 100 sumur dangkal juga banyak, sehingga orang bis amandi juga, bisa masak juga, bisa reboisasi juga.

KETUA RAPAT:

Dapil berapa, alamatnya nggak jelas.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Jadi Dapil saya itu NTT.

Jadi kami sangat mengapresiasi karena kami terus terang kami dapat bantuan juga cukup banyak, hanya kendala lagi Bu, masyarakat ini harus mendengar dulu, habis mendengar dia melihat, sudah dia melihat baru dia percaya, dia sadar dulu baru dia percaya. Kalau hanya kita kasih program saja tanpa pendampingan itu sama saja kita buang garam di laut. Saya tertarik dengan programnya Pak Harto, dulu namanya kelompok pendengar, (Kelompok Pendengar Pembaca Pemirsa), itu harus digalakkan kembali, karena penyuluh-penyuluh itu belum tentu canggih mereka. Mereka satu bulan baru ke lapangan sekali. Jadi tolong saya usul saja kalau bisa

kelompok itu digalakkan kembali, karena orang di kampung ini dia ini jarang baca buku, sudah baca buku juga dia hanya baca tapi tidak paham, sudah tidak paham bagaimana dia mau eksekusi lagi. Ini memang sangat sulit.

Saya kira hanya itu saja, tolong itu yang saya sampaikan, sebenarnya semuanya fine-fine saja kalau kita saling mendengar. Kami ini saya sudah satu tahun di DPR RI, sudah 500 desa yang saya jalani, karena kecintaan saya kepada masyarakat desa. Dulu saya belum jadi dia bilang bantuan nggak ada, sekarang bantuan sudah banyak malas lagi, itu yang saya marah betul-betul itu. Karena bantuan ini bukan untuk kasih uang, untuk kamu pakai beli baju bukan. Ini menciptakan lapangan kerja kamu, PHK dimana-mana, supaya kamu bisa berwirausaha. Inikan pemahamannya sempit, hanya dikasih bantuan dia pakai untuk belanja yang lain-lain, kasih kambing dia jual. Jadi memang ini perlu pendampingan yang melekat, bahasanya sederhana tapi kalau tidak dijalankan ya mubajir. Kita nanti 5 tahun di DPR RI anakan 100 ribu ton yang tumbuh mungkin 5000 saja, mau kasih salah siapa ini.

Terima kasih Bapak Ketua.

Hanya ini saja yang saya sampaikan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Edward.

Akurat karena fakta bukan retorika.

Selanjutnya kami persilakan Ibu Riezky, perlu saya perkenalkan Ibu Riezky ini hari ini telah pecah sebagai Kapoksi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena suratnya sudah turun.

Silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pak Kyai.

Tapi tidak usah diulang terus.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya ingin mengingatkan kembali tadi sudah terima kasih *statement* saya Minggu lalu sudah dibantu oleh teman-teman dari Fraksi Gerindra, terkait mempertanyakan mengevaluasi kembali masalah Minamata. Karena begini tapi kita sempat ngobrol bahwa kita sangat paham anggaran hari ini dipotong, terus ekspektasinya adalah program ini bisa lebih membantu giat perekonomian masyarakat di hampir seluruh wilayah. Karena apa? toh hari ini kita di-*banned* dalam arti di-*banned* dalam *quote to quote* karena covid. Kalau memang anggaran itu bisa digeser atau kalau memang biasanya

pertemuannya via zoom itukan bisa menekan angkanya lebih besar lagi untuk dialihkan mungkin ke DRGM yang anggarannya nggak naik-naik, kan kayak begitu.

Nah, kemudian menjadi atensi kami saya rasa di Komisi IV DPR RI masalah limbah. Saya kemarin mohon maaf Bu Dirjen, nonton di TV terkait limbah di pinggir tol ya di Kabupaten Bekasi katanya kalau saya tidak salah. Dan juga banyak permasalahan Pak, saya coba meng-*google* gitu apa sih permasalahan yang banyak sekali ternyata. Saya berharap Ibu Menteri yang kami cintai gitu supaya tolong agak serius ke depannya ini mendorong anggaran terkait limbah Bu. Gimana COVID-nya mau berhenti kalau sampah medisnya tidak tahu mau diapakan juga itu, karena anggarannya juga kecil. Ini bukan apa-apa, kalau bisa tolonglah di-*balance* itu. Konservasi juga kan memang butuh perhatian dengan banyaknya macan lepas, harimau lepas, tapi banyak buaya di sini lepas diem saja. Yang merasa buaya pasti senyum Ibu Menteri, oh Komodo ya.

Jadi saya mohon masalah limbah ini ya jangan sampai menjadi permasalahan baru. Permasalahan baru ini Bu Menteri, Pak Sekjen dan Ibu Dirjen PSLB3 ya kami berharap juga Gakkum jangan sampai juga kebobolan lagi kayak waktu itu kita sidak. Nanti ini limbah di dalam negeri juga belum terkontrol tiba-tiba ada yang kirim lagi repot lagi kan gitu loh. Jadi kerja sama sinergitas terkait penanganan limbah sampah ini mohon kedepannya untuk didorong secara serius.

Kemudian masih limbah juga saya, membaca lagi banyak permasalahan contohnya tentang limbah sawit yang ada di Rembang, limbah tekstil, limbah apapun itulah. Jadi saya nggak tahu ya *skill of priority* dari lingkungan hidup apa, kehutanan apa, *let's combined together* itu maksudnya seperti apa yang harus kita lakukan. Tadi teman-teman berbicara masalah kawasan, masalah apa, masalah apa, oke, akan tetapi jangan juga mengenyampingkan masalah yang sebenarnya ini bisa membuat permasalahan besar apabila tidak ditanggulangi.

Kemudian ini yang sebenarnya Ibu harus garis bawahi sekali lagi Pak Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan harus bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, terkait alih fungsi lahan, *sorry* saya ngomong agak serius, karena apa? alih fungsi lahan laporan Kementerian Pertanian bagus terus lahan enggak, nanamnya dimana Pak, terus mimpinya swasembada kita stop berhalusinasi. *Food Estate* tujuannya apa? Tujuan *Food Estate* ini bukan kita tidak *support*, kita *support* tapi realistiskah. Oke, sekarang di Kalimantan Tengah *Food Estate*-nya mau meng-*cover* wilayah mana itu, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, mungkin Indonesia Timur di NTT yang mau dibikin *Food Estate*-nya. Hari inikan gagal, karena tadi apa si Nina dan si Nino tadi kan begitu.

Nah, jadi hal-hal yang dianggap mungkin tidak perlu tapi ternyata sangat perlu, makanya saya bilang berkali-kali para Kementerian harus membuka diri dengan Kementerian lain atau Lembaga lain. Nggak akan selesai dengan Kementerian sendiri, apalagi anggarannya hari ini dipotong

terus Ibu Menteri. Saya juga berharap teman-teman yang duduk di Banggar kedepannya tolonglah Ini masalah limbah jangan sampai nanti masalah serius lagi, kita lagi yang kena. Saya selalu bilang dimata masyarakat yang jelek, yang brengsek mohon maaf harus saya katakan bukan eksekutifnya Pak, tapi katanya legislatifnya tidur nggak pernah ngurusin masyarakat.

Saya akhiri.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Terima kasih Ibu Kiki, ceramah umumnya.

Pak Johan Rosihan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Kyai Hasan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI, serta Menteri Lingkungan Hidup dan seluruh jajarannya.

Saya ijin membaca saja Ketua biar cepat, kalau tidak membaca malah lama saya.

Pimpinan yang saya hormati.

Pada rapat pendalaman mengenai refocusing dan realokasi anggaran belanja Kementerian pada hari ini, kami Fraksi PKS ingin menyampaikan rasa penyesalan atas pemotongan anggaran sebesar Rp520 miliar ini. Namun, kami berharap ini tidak boleh membuat kita berkurang upayanya dalam pengelolaan hutan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pemotongan yang terjadi cukup signifikan, yaitu 7% dari total anggaran. Pada dasarnya anggaran pasca pemotongan hanya terdapat selisih 2,8% dari realisasi anggaran 2020. Tekanan terhadap kapasitas fiskal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus membuat Kementrian lebih kreatif dalam mendapatkan sumber pendanaan bukan dari hutang tentunya, tetapi dari sumber lain seperti investasi hijau ataupun bantuan donor serta mitra pembangunan yang tidak bersifat mengikat.

Pimpinan, Ibu Menteri yang saya hormati,
Serta seluruh yang hadirin.

Begitu banyak komitmen Pemerintah kita pada sektor Kehutanan dan lingkungan hidup yang perlu kita kawal untuk direalisasikan. Target nasional program perhutanan sosial sebesar 12,7 juta hektar lahan untuk masyarakat.

Target restorasi gambut dan mangrove 1,2 juta hektar, juga target menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29%. Untuk memastikan kerja-kerja tersebut tercapai laporan atas kinerja Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada setiap Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI harus memberikan ukuran-ukuran yang tegas dan jelas agar target atas target yang telah ditetapkan.

Pimpinan dan Anggota serta Bu Menteri, serta jajaran yang saya hormati.

Prioritas Nasional yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan *leading actor* pada Prioritas Nasional 6, yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Oleh karena itu, Fraksi PKS memiliki pandangan dan pertanyaan terkait.

Pertama, mengenai membangun lingkungan hidup. Berdasarkan parameter indeks kualitas lingkungan hidup, indeks kualitas udara, kondisi lingkungan hidup kita semakin membaik. Hal ini merupakan capaian yang harus diapresiasi menjadi bagian dari kinerja baik Kementerian Lingkungan Hidup. Walaupun capaian tersebut tidak terlepas dikarenakan menurunnya aktivitas industri dan mobilitas masyarakat, karena pandemi covid-19. Oleh karenanya, kami menginginkan adanya visi jangka panjang untuk menjaga kualitas lingkungan hidup untuk memastikan burung tetap berkicau, untuk memastikan air tanah dan air permukaan tetap dapat menjadi air baku bukan menjadi banjir seperti sekarang.

Dalam hal ini kami memberikan beberapa pandangan dan pertanyaan. Satu, penting untuk Kementerian LHK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengembangkan pendidikan lingkungan agar generasi penerus lebih peka akan pentingnya menjaga ekosistem hutan dan lingkungan. Apakah telah terdapat kebijakan atau kurikulum bagi guru dan murid terkait pendidikan lingkungan. Bila tidak memungkinkan melalui satuan pendidikan formal dapat juga dilakukan dengan kerja sama melalui lembaga ataupun komunitas masyarakat.

Dua, pada kesempatan rapat yang lalu kami telah mengungkapkan pentingnya mengatasi limbah medis dari dampak covid dan juga mengingatkan kapasitas pengelolaan, sebab adanya gap antara kapasitas dengan limbah yang dihasilkan. Sejauh yang kami ketahui proses penanganan limbah medis adalah dilakukan dengan cara manual, dengan cara dibakar. Bahkan sempat terdapat kasus adanya proses pembakaran secara terbuka. Fraksi PKS berpandangan perlu adanya langkah pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi. Kami minta pandangan dari KLHK atas gagasan ini sehingga kami Komisi IV DPR RI dapat memberikan dukungan baik dari sisi regulasi maupun dukungan anggaran.

Kedua, mengenai meningkatkan ketahanan bencana. Ancaman bencana alam seperti kekeringan, banjir, kebakaran hutan dan lahan, puting beliung, merupakan pertanda ekosistem kita yang tidak seimbang. Fraksi PKS

terus mengingatkan Pemerintah untuk meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan, serta memperbaiki kondisi daerah aliran sungai baik secara teknis maupun vegetative. Selain meningkatkan ketahanan atas bencana alam, hari ini kita juga perlu waspada terhadap bencana non alam, seperti pandemi covid-19 yang dampaknya sangat dahsyat bagi kehidupan sosial ekonomi dan lingkungan. Oleh karenanya, kami memberikan pertanyaan. Masyarakat mulai dirasakan dengan adanya pandemi jilid 2, yaitu virus Nipah. Virus Nipah menurut para ahli berasal dari hewan kelelawar yang dapat menular pada manusia. Menyangkut hal ini langkah mitigasi apa yang dilakukan oleh Menteri KLHK. Sebagai Kementerian yang bertanggung jawab atas kehidupan satwa secara umum kami juga berharap KLHK yang akan dapat memberikan informasi yang tepat dan menenangkan bagi masyarakat terkait adanya ancaman bencana non alam yang baru ini.

Ketiga, mengenai perubahan iklim. Tahun 2021 negara-negara dunia termasuk Indonesia akan mengikuti konferensi perubahan iklim di Scotlandia. Momentum tersebut harus kita manfaatkan untuk menegaskan posisi strategis Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global. Berdasarkan paparan disampaikan oleh Kementerian penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2021 justru turun menjadi 24,10% dari 26% pada tahun 2020. Apa yang menyebabkan emisi penurunan emisi gas rumah kaca ini terjadi, seharusnya kita dapat terus meningkatkan penurunan emisi gas rumah kaca terlebih sektor kehutanan yang mendapatkan target lebih dari 17%. Bila angkanya menurun maka Indonesia akan sulit untuk mendapatkan dukungan internasional untuk dapat menurunkan emisi hingga 14% pada tahun 2030.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,
Ibu Menteri dan seluruh jajarannya.

Pada Rapat Kerja sebelumnya Komisi IV DPR RI merekomendasikan keputusan agar LHK memperkuat program kemitraan konservasi dalam rangka memperkuat akses masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk memanfaatkan hasil hutan. Bagaimana pelaksanaan model kemitraan tersebut selama tahun 2020 yang lalu. Dan bagaimana rencana pelaksanaannya tahun 2021 ini. Demi meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat sektor hutan sesuai dengan tema RKP 2021, yaitu memperkuat, mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

Kami Fraksi PKS menginginkan target-target yang ditetapkan sekedar janji utopis untuk perbaikan kehutanan, lingkungan serta kegiatan masyarakat. Prioritas Nasional yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah dan janji-janji Pemerintah atas perhutanan sosial, penurunan emisi gas rumah kaca dan restorasi gambut dan mangrove merupakan agenda harus kita kawal secara bersama-sama untuk direalisasi.

Demikian pendapat kami Pimpinan.

Kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Selanjutnya Ibu Julie Laiskodat.

F-NasDem (JULIE SUTRISNO):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan, Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang saya hormati Ibu Menteri dan jajarannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,
Salam sehat dari NTT (Nusa Timur Terindah).

Ijin Pak Edward.

Di masa pandemi KLHK juga memiliki peran penting dalam menekan laju penularan COVID-19 melalui pengolahan limbah infeksius yang efektif. Mengingat kontribusi positif KLHK, baik dari aspek lingkungan maupun sosial ekonomi, kami mendorong peningkatan penerapan anggaran di tahun 2021 dan kenaikan anggaran KLHK di masa mendatang, khususnya untuk mengakselerasi laju rehabilitasi lingkungan. Kami mendukung KLHK untuk mengajukan anggaran belanja tambahan 2021 guna mencapai target-target yang ditetapkan, termasuk dalam upaya rehabilitasi mangrove.

Kami mengapresiasi realisasi perhutanan sosial, serta rendahnya laju deforestasi dan menurunnya kebakaran hutan secara signifikan. Fraksi Partai Nasdem berharap agar kinerja tersebut dapat terus dipertahankan. Terkait refocusing dan realokasi anggaran 2021 kami meminta KLHK untuk memprioritaskan program rehabilitasi lahan-lahan kritis terutama di area yang terdampak bencana banjir dan longsor. Kami juga mengharapkan program padat karya yang berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi nasional.

Kami mendorong KLHK untuk mengupayakan penyelesaian konflik tata ruang, melalui penerapan RPP penyelesaian ketidak sesuaian antara tata ruang dengan kawasan hutan, ijin dan atau hak atas tanah secara efektif termasuk melalui sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Terkait prioritas Nasional 2, kami meminta agar Pemerintah mempertimbangkan kembali program pengembangan wilayah dalam rangka mendukung ibu kota negara. Mengingat di masa pandemi masih banyak masyarakat sekitar hutan yang perlu dibantu, diberdayakan dan disejahterakan. Kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi prioritas, pengadaan alat pemantauan kualitas udara dan air otomatis juga membutuhkan anggaran yang begitu besar. Kami minta KLHK untuk mengkaji kembali urgensi dari program ini.

Kami mendorong KLHK untuk menjadi *leader* dalam mendorong tumbuhnya inovasi hijau di sektor industri melalui penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Kami mendorong adanya kolaborasi yang lebih erat antara KLHK dengan sektor industri agar hasil penelitian Balitbang KLHK akan dapat diimplementasikan dan dikembangkan, baik secara komersial maupun non komersial.

Kami mendorong KLHK untuk lebih memperhatikan aspek penyuluhan dan pendidikan kesadaran lingkungan bagi masyarakat karena masih banyak masyarakat, baik di kota maupun di pedesaan yang tidak mengindahkan aspek lingkungan dalam perilaku dan keseharian mereka. Kami meminta KLHK untuk meningkatkan penyelesaian konflik tenurial dan mengakselerasi pencapaian target penetapan hutan adat. KLHK harus lebih melibatkan masyarakat dalam rencana penggunaan lahan untuk perkebunan maupun pertambangan.

Kami juga meminta KLHK untuk menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat adat dan mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup dan HAM. Kami mengharapkan agar pemberian bantuan alat ekonomi produktif yang menurun pada 2020 lalu dapat ditingkatkan kembali di tahun 202, karena program ini sangat berdampak pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi produksi hasil hutan.

Terakhir kami mendorong KLHK untuk terus memberikan pendampingan dan pelepasan kelompok perhutanan sosial, termasuk mencari solusi terhadap terjadinya ketimpangan penguasaan lahan, pungutan liar, konflik kepentingan serta aspek teknis yang dibutuhkan warga dalam mengelola perhutanan sosial secara berkelanjutan. Saya tidak akan bacakan aspirasi nanti habis rapat baru saya serahkan.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih ibu Julie.

Besok setelah Paripurna segera ke NTT.

Bapak Haerudin, ustad.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan yang terhormat,
Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,

Ibu Menteri beserta jajaran pejabat Eselon I yang ada di KLHK yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah kami dari Fraksi PAN diberikan kesempatan, terima kasih. Mudah-mudahan rapat kita hari ini, Rapat Kerja kita hari ini mendapatkan berkah, mendapatkan kebaikan dan menjadikan rapat yang produktif untuk membangun kehutanan kita di seluruh nusantara.

Pimpinan, Ibu Menteri yang saya hormati.

Mudah-mudahan anggaran yang jumlahnya Rp7 triliun kita ini hari ini setelah pemotongan walaupun tentu dengan berat hati kita terima. Mudah-mudahan bisa didorong jauh lebih besar untuk kesejahteraan rakyat kita, terutama rakyat yang ada di lingkungan hutan. Karena dari seluruh hitungan produk negeri kita tentu bisa berhitung, bahwa jutaan rakyat kita itu hidup dan bergantung kepada hutan. Mudah-mudahan anggaran kita juga berpihak dan sekaligus Fraksi PAN mendorong anggaran yang Rp7,4 triliun ini bisa berpihak kepada pembangunan kesejahteraan rakyat.

Yang kedua, Fraksi PAN tetap mendorong perhutanan sosial itu terus dilanjutkan didorong, karena itu hak ruang atas rakyat kita untuk mendapatkan tempat hidup berkesejahteraan. Susahnya tanah di mana-mana, susah ruang untuk bertani di mana-mana, berladang, bercocok tanam, maka kebijaksanaan KLHK dengan adanya program dan proyek perhutanan sosial adalah sebuah kebijaksanaan yang berempati, bahkan memberikan ruang kehidupan bagi rakyat.

Yang ketiga, Fraksi PAN ingin mendorong kepada terutama BKSDAE. Mudah-mudahan kebijakan ke depan itu saling bertimbangan terhadap yang didahulukan itu masyarakat. Perijinan yang keluar itu dilihat itu masyarakatnya, apa dampak dan apa kepentingan rakyat di sekitar yang harus terbela, jangan pengusahnya yang didahulukan, rakyatnya kesusahan. Dan ini tentu kami atas nama Fraksi PAN bertanggungjawab pernyataan ini. Tetapi mudah-mudahan kita kedepan bisa melakukan proses perbaikan yang lebih baik dan tetap berpihak kepada rakyat.

Yang terakhir Ibu Menteri, Fraksi PAN tentu berharap deforestasi ini dan mengapresiasi KLHK, bahwa walaupun posisinya masih 600.000-an lebih deforestasi kita itu, tapi paling tidak sudah menurun. Dan mudah-mudahan ini bisa ditekan jauh lebih sedikit lagi yang kita lepas, kalau nol tidak mungkin tapi kalau berkurang sangat mungkin. Dan kami minta komitmen dari KLHK mudah-mudahan menahan laju deforestasi adalah jihadnya Ibu Menteri beserta seluruh jajarannya KLHK melawan ekoterorisme, terorisme terhadap lingkungan hidup.

Yang terakhir, kami ingin sampaikan Ibu menteri dan seluruhnya kita yang hadir hari ini. Mudah-mudahan KLHK kita kedepan mendapatkan anggaran yang jauh lebih strategis dan berpikir juga yang strategis. Salah

satu contoh IKN tempat ibu kota kita hari ini yang akan dihadirkan dalam kondisi masa pandemi jauh tidak lebih penting ketimbang kita menghadapi bagaimana dampak dari bencana Covid ini. Tentu ini tugas kita, baik seluruh yang berorientasi pada pangan punya tugas yang lebih strategis.

Mengingatkan untuk Pak Roy, dalam proses penanganan hukum. Tentukan dari setahun kita tadi saya baca ada 65, jadi dari ratusan masalah mungkin ribuan masalah. Kinerja butuh ditingkatkan, jangan sampai pengusaha kecil yang di obrak-abrik, pengusaha besar tenang-tenang saja. Dan tentu ini jangan jadi sebuah ironi dan kita dipermalukan rakyat kita sendiri.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Alhamdulillah bijak, halus, adem kata Bapak Ketua agak benar.
Ibu Ema silakan, *Insyallah* satu menit nggak mau panjang-panjang.

F-PPP (EMA UMMIYATUL CHUSNA):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang kami banggakan,
Ibu Menteri beserta Bapak-Ibu Dirjen beserta jajaran yang kami hormati.

Tidak banyak yang kami sampaikan karena nanti setelah Raker akan kami serahkan ke Setkom untuk diserahkan kepada Kementerian KLHK. Ada dua hal Ibu, terkait dengan adanya musibah banjir yang akhir-akhir ini di mana-mana terjadi karena meluapnya air debit sungai dan curah hujan tinggi. Yang mana pasti datangnya dari dataran tinggi, ternyata di daerah kami itu memang sampah dari ranting-ranting pohon dan dedaunan yang dibuang ke sungai sehingga menghambat aliran sungai ini membuat air melimpah ke perkampungan. Mohon dari KLHK ini juga sangat dibutuhkan untuk analisa dari dampak banjir tersebut, mohon diperhatikan.

Yang kedua, kami beberapa waktu yang lalu melaksanakan kunjungan ke Dapil. Banyak ada keluhan Bu yang beberapa waktu yang lalu Komisi IV DPR RI melaksanakan kunspek ke Jawa Timur, khususnya di kabupaten Jombang, terkait dengan penanganan limbah B3. Yang mana maksud tujuan kami datang ke sana ingin melihat produksi limbah B3 yang diolah kembali menjadi bahan baku untuk membuat wajan, alat-alat dapur. Dan itu masyarakat banyak yang bekerja di sana sebagai kuli pengangkut limbah

tersebut. Dari dampak COVID ini mereka banyak yang nganggur, tidak bisa bekerja.

Nah, niat maksud tujuan kami kesana limbah tersebut karena saking banyaknya limbah yang dibuang itu sangat berpengaruh kepada masyarakat, dibuang di pinggir jalan, pinggir sungai yang mana di sebelahnya adalah aliran irigasi sungai yang membuat hasil pertanian juga kurang berkualitas begitu ada limbah tersebut. Hasrat hati kami ingin menunjukkan kepada pihak KLHK untuk penanganan bagaimana limbah-limbah yang sudah dibuang sembarangan ini. Dan *Alhamdulillah* di 2021 Ibu Dirjen dari KLHK sudah menganggarkan untuk normalisasi atau untuk penanganan limbah tersebut. Tapi mungkin belum bisa maksimal dengan anggaran yang sedikit, karena kami memaklumi 2021 ada refocusing. Kami mohon di 2022 nanti juga menjadi prioritas, masih tetap menjadi prioritas untuk bagaimana normalisasi dan penanganan pembuangan limbah yang sembarangan tersebut.

Dan kami sangat menyesalkan dan menyayangkan beberapa waktu yang lalu ada dari Gakkum turun provinsi untuk menutup beberapa pabrik pengolah limbah B3 tersebut, tanpa melalui koordinasi, negosiasi terlebih dahulu. Padahal kenyataan di lapangan yang mengelola limbah B3 pabrik maupun home industri jumlahnya lebih dari 100 pabrik. Kenapa hanya 4, yang 4 ini Bu *Alhamdulillah* konstituen saya, sehingga efek dan dampaknya saya begitu datang di sana dan sayalah yang menutup pabrik tersebut. Nah, ini mohon dinetralisir, kami mohon kepada pihak Gakkum untuk ditangguhkan terlebih dahulu sambil kita nanti berkomunikasi. Kalau toh bermasalah dengan perijinan kami juga siap membantu untuk perijinan tersebut asalkan limbah pembuangan limbahnya juga pihak KLHK ikut menyelesaikan solusi tersebut, karena sangat kompleks permasalahannya. Masyarakat tidak bisa bekerja dan ada beberapa yang dirugikan dan yang lain tidak diproses hukum, kenapa hanya 4.

Jadi kami mohon Bu ini untuk sementara ditangguhkan dulu sambil juga ada sosialisasi dari pihak KLHK kepada masyarakat betapa bahayanya limbah B3 itu dibuang sembarangan. Karena kurang adanya komunikasi dan sosialisasi secara intensif kepada tokoh masyarakat yang ada di sana maupun warga, sehingga mereka menganggap limbah B3 ini hal yang biasa. Mohon diperhatikan dan kami tunggu, karena beberapa hari lagi kami akan reses sehingga pasti nanti kami juga akan banyak menerima demi dari masyarakat terutama di daerah kami.

Mungkin itu Ibu Menteri yang bisa kami sampaikan. Mohon juga diperhatikan Bapak dari Gakkum untuk nanti bisa komunikasi dengan kami, bagaimana solusi dan penanganan pabrik-pabrik tersebut sehingga ditangguhkan proses hukumnya terlebih dahulu, sambil nanti ada solusi yang terbaik.

Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Ibu Alien Mus.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan saya dan salah satu Pimpinan cantik juga, yang sebelah kanan warna pink maksudnya. Haduh ini kalau ada, jangan gitu dong anak saya Slamet,
Yang saya hormati Bapak Slamet, Slamet yang di belakang Madura ya,
Yang saya hormati Bapak-Ibu Komisi IV DPR RI dan juga Ibu Menteri beserta Sekjen, beserta jajaran Eselon I yang *Insyah Allah* kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wata'ala, sehat wal'afiat, aamiin ya rabbal'alamin.

Ibu Menteri, sesuai dengan rapat kemarin saya juga sangat tegas sekali tentang Gakkum. Saya juga mendapat surat walaupun saya bukan Dapil dari Jawa Timur, tapi saya juga telah mem-*follow up* kepada Bapak Roy tentang 4 perusahaan yang disampaikan oleh Bu Ema dan sebelumnya dari Mas Guntur. Saya ingin menyampaikan yang saya dilaporkan oleh beberapa orang yang ada di Jawa Timur tentang masalah 4 perusahaan ini, ternyata perusahaan tersebut dari 120 perusahaan dan 4 perusahaan tersebut adalah usaha mikro kecil. Yang aneh bin ajaibnya berdasarkan dengan hasil Kunspek dari Komisi IV DPR RI bersama dengan Pimpinan saya waktu itu ada Pak Hasan.

Seharusnya langkah yang diambil oleh Gakkum memanggil dan memberikan mungkin satu peringatan, tapi tidak langsung diberikan sanksi misalkan. Tapi saya juga setuju kalau memang 4 perusahaan ini pun salah dan juga 12 perusahaan itu salah, kenapa hanya 4 perusahaan ini tapi tidak dipanggil seluruh perusahaan, apa ini. Apakah ada tebang pilih antara perusahaan tersebut atau bagaimana klasifikasi permasalahannya seperti apa, ini harus tegas.

Kemudian saya mau bertanya sesuai dengan data yang saya dapat juga dari tahun 2012 telah terjadi pembukaan kebun tanpa iJin atau ilegal di dalam kawasan hutan negara terdapat lebih dari 1.000 perusahaan dengan luas lebih dari 8 juta hektar dan pembukaan tambang ilegal dalam kawasan hutan lebih dari 2.000 perusahaan dengan luas lebih dari 10 juta hektar. Yang saya tanyakan Ibu Menteri, haduh ini Gakkum lagi ini, Ibu telah menjabat sebagai Menteri KLHK telah berjalan *Alhamdulillah* pada tahun 2021 ini sudah tahun ketujuh. Sudah berapa perusahaan kebun dan tambang yang telah dipidanakan atau mendapat hukuman penjara berdasarkan Undang-Undang

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penindakan Pengrusakan Kawasan Hutan.

Dan saya minta data perusahaan dari rapat-rapat kemarin sampai ini dan saya minta lagi data perusahaan kebun dan tambang yang telah dikenakan pidana hukuman penjara selama 5 tahun terakhir. Dan beberapa perusahaan yang masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Dirjen Gakkum. Dan saya minta melalui Pimpinan bagaimana kita mendapatkan data penindakan pembukaan kebun dan tambang ilegal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Yang saya hormati Ibu Menteri.

Berdasarkan data rata-rata anggaran Kementerian LHK tiap tahun kalau tidak salah hampir sebesar Rp6 triliun lebih. Dan *Alhamdulillah* juga sampai sekarang sudah masuk tahun ketujuh berarti Ibu Menteri telah mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan oleh negara kepada Ibu Menteri sebesar Rp42 triliun lebih. Saya ingin tanyakan berapa luas kawasan hutan yang sudah direboisasi dan saya minta dapat dikirimkan data lokasi dan luas tanaman reboisasi dan saya usulkan kepada Komisi IV DPR RI melalui Pimpinan agar kita melakukan Kunsfek untuk melihat tanaman reboisasi. Saya mendapatkan jawaban juga dari Gakkum, jawaban kesimpulan keputusan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup, saya sudah mendapatkan juga jawabannya. Jawaban dari KLHK realisasi 6 tahun masih kecil, kasus tambang yang baru ada 60 kasus dan yang lama ada 50 kasus, us perkembangannya seperti apa.

Kemudian saya ingin menindaklanjuti apa yang saya sampaikan di Raker kemarin. Bu Menteri, kapankah saya mendapatkan kepastian untuk masalah yang ada tentang pelepasan ijin HPH di Kabupaten Kepulauan Taliabu di Provinsi Maluku Utara. Dan saya ingin yang disampaikan oleh Pak Sekjen tim yang akan turun ke sana kalau memang KLHK tidak sanggup saya yang akan mempersiapkan semuanya untuk turun sampai di lapangan dan untuk melihat bagaimana masyarakat sangat menolak ijin yang dikeluarkan tersebut. Karena saya tahu sampai di daerah saya itu butuh penerbangan hampir 4 jam lebih, butuh naik kapal 18 hampir 20 jam. Jadi saya akan mempersiapkan untuk KLHK tidak sampai waktu yang demikian, tapi Bapak atau Ibu yang mau turun di tempat saya, saya persiapkan dari A sampai Z tidak kekurangan satupun. Tapi saya harap ijin yang dikeluarkan itu harus dievaluasi, karena tadi Bu Menteri sebelum ditebang kayunya sudah banjir masuk ke desa-desa. Sebelum ditebang kayunya orang sudah mengeluh "jangan lagi Bu, jangan lagi".

Ini peringatan buat kita semua Bu, ini di tempat saya, saya lahir di sana. Jadi kalau memang Ibu tidak bisa memberikan ijin untuk tim yang turun tolong gakkum juga bisa ikut, karena ini bisa jadi masalah karena seharusnya pelepasan satu kawasan hutan yang di situ juga ada pemilik dari pada warga itukan harus diperhatikan, ini ada sangkut-pautnya. Jadi tolong itu diperhatikan agar saya merasa Bu, kalau memang Menteri KLHK serius dengan perusahaan-perusahaan, baik tambang, ilegal logging, maupun

perkebunan, saya yakin dan percaya PNPB dari KLHK bisa lebih dari pada yang ditargetkan di KKP Rp12 triliun. Tapi bagaimana penanganan kasusnya harus benar-benar, harus benar-benar teliti dan jangan ada main-main di sini, karena saya tahu persis sesuai dengan info-info yang kami dapat, baik yang dipercaya maupun dari surat, maupun dari pengusaha ada permainan yang luar biasa di KLHK ini. Akhirnya kita semua juga yang rugi dan *Alhamdulillah* kita semua saling menyalahkan, padahal semuanya hanya dengan coretan tangan dan garis tangan yang diberikan kepada seseorang dan dipercayakan untuk membuka satu lahan, tapi tidak memikirkan dampaknya nanti.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cukup Ibu Alien sudah 4 menit.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Mohon maaf Ketua, masalah hutan masalahnya jadi karena Bapak Ketua sudah begitu, baiklah saya tidak bisa berbuat apa-apa.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya yang terakhir Mbak Luluk.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Belum ngucapin salam Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan salam dulu.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Terima kasih Ketua yang sangat kalem hatinya pagi ini.

Ibu Menteri yang saya hormati beserta seluruh jajarannya,
Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI.

Saya ingin menanyakan beberapa hal sebenarnya ini me-review dari beberapa pertemuan sebelumnya Ibu, yang pada waktu Raker sebelumnya, bahkan saya punya catatan yang mana Ibu pernah mengatakan bahwa pada tahun 2020 merupakan tahun pemulihan lingkungan hidup, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang kita mau tanyakan apakah Ibu, apa yang sudah dilakukan KLHK sebenarnya untuk bisa mengatakan bahwa target pemulihan lingkungan hidup bisa dilakukan, karena begitu kita memasuki tahun

2021 saja kita dihantam begitu banyak bencana. Dan kemudian kita juga lihat jawaban Ibu, cara merespon Ibu yang terkait dengan bencana seolah-olah tidak ada kaitannya juga dengan kondisi lingkungan hidup kita yang bebannya semakin berat, padahal itu dulu pernah disampaikan sendiri oleh Ibu.

Kemudian Ibu juga mengatakan bahwa akan mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan kepada lebih kurang 300 perusahaan yang dianggap melakukan kejahatan kepada lingkungan. Nah, apakah itu juga sudah dilakukan kepada Ibu dari 300-an perusahaan itu berapa yang sudah diajukan atau yang digugat, ini saya membaca media. Kemudian pada akhir, bukan akhir tapi pertengahan 2020 Agustus, Gubernur Jawa Tengah melakukan sidak kira-kira begitu karena adanya laporan pencemaran sungai dan juga Bengawan Solo yang sangat kronis. Dan ternyata di Sungai Sroyo itu di Kabupaten Karanganyar ditemukan banyak sekali pipa-pipa untuk mengalirkan limbah industri yang mengeluarkan bau sangat menyengat dan menyebabkan sungai juga berwarna hitam. Hanya saja sayangnya Gubernur tidak menyatakan siapa perusahaan-perusahaannya, meskipun beliau mengatakan perusahaannya itu siapa dan bagaimana. Kiranya apakah LHK juga meng-*update* situasi itu dan saya mohon dalam kesempatan ini untuk diberikan data perusahaan yang jelas nyata-nyata mengalirkan limbah berbahaya di sungai-sungai itu.

Ibu Menteri yang saya hormati.

Saya hanya tidak ingin ini mungkin hampir selesai pernyataan saya, bahwa kondisi Bengawan Solo jangan sampai sebagaimana yang terjadi di Sungai Citarum. Jangan sampai kondisi pencemaran itu sudah pada titik yang sangat-sangat besar baru kemudian kita melakukan tindakan. Sekarang saja selain ada limbah industri yang terus-menerus tidak bisa ditangani secara baik juga sudah mulai ditemukan adanya mikroplastik yang itu kandungannya sudah sangat membahayakan untuk kehidupan dan juga ikan-ikan yang disana. Bahkan menurut orang-orang dan warga sekitaran bantaran sungai, ikan saja itu sudah tak mau itu hidup di sekitaran sungai atau di Bengawan Solo. Padahal Bengawan Solo itu Ibu dari sungai di Jawa Tengah dan Jawa Timur Ibu. Kita sudah tak lagi bisa menyanyikan indahny lagu Bengawan Solo Ketua, karena memang kondisinya sudah berbeda. Makanya saya agak sedikit kecewa kalau kemudian Bengawan Solo ini tidak mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah karena hanya belum meluapkan bencana mungkin, saya khawatir begitu kalau ada bencana baru kemudian ramai-ramai dilakukan tindakan tapi itukan kasep.

Nah, oleh karena itu segenap kerja-kerja menyeluruh dari Dirjen atau Eselon I Ibu yang dimungkinkan bisa bekerja dari mulai hulu sampai hilir, jadi hulunya itu ada di Wonogiri itu ada tiga sungai yang terhubung di sana dan hilirnya itu bisa di Sragen dan sampai ke Jawa Timur itu benar-benar dilakukan. Saya usul sih ada Satgas Ketua, khusus Satgas yang menangani Bengawan Solo sebelum ini menjadi bencana besar-besaran.

KETUA RAPAT:

Cukup Mbak Luluk.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Iya Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Gus Adhi.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Saya boleh salam dulu ya Ketua.

KETUA RAPAT:

Boleh.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Salam sehat dan selamat bekerja Ibu.

Terima kasih dan titip yang Rp19,3 triliun untuk di-*followup* seperti apa kordinasinya dengan Kementerian atau Lembagaan terkait.

*Wallahu Muwafiq Ila Aqwamith Tahriq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Ibu Menteri yang saya hormati beserta jajaran.

Jadi saya melihat total pelepasan hutan Ibu sangat tinggi sekali, di tahun 2015 sampai 2020 ini. Jadi pertanyaan saya singkat-singkat saja, sejauhmana sudah Ibu mengadakan penelitian terkait dengan upaya pelepasan hutan ini, jangan sampai ekosistem terlalu banyak terganggu. Disini juga salah satunya saya melihat Bali disini ada 62 sudah berkurang. Kemarin sudah berkurang lagi fungsinya yaitu pembangunan jalan yang menuju Denpasar-Singaraja. Dan yang terakhir sekarang yang sedang hangat-hangatnya di Bali Bu Menteri, saya ingin menanyakan rencana pembangunan pelabuhan yang juga akan memakan 64 hektar hutan kita yang di Taman Nasional Bali Barat.

Nah, disini perlu dikaji kami di Bali hanya memiliki satu kebanggaan lagi, yaitu Jalak Bali. Di 64 hektar itu rencananya akan dibangun *runway*, nah ini menurut saya dan sekaligus menjadi pertanyaan apakah sudah dikaji Ibu. Andaikata *runway* dibangun di situ ada Jalak Bali, ada Banteng, apakah lama-kelamaan tidak akan hilang. Kalau itu hilang berarti Jalak Bali tidak akan ada di rumah kembali, yaitu di Taman Nasional Bali Barat. Jadi intinya saya ingin mengingatkan Bu Menteri, bagaimana fungsi Kementerian Kehutanan ini mempertahankan hutannya sendiri. Dan saya mohon kepada Pimpinan nanti dalam kunjungan Reses kita akan meninjau ke Taman Nasional Bali Barat.

Terus yang kedua, di dalam pandemi ini peningkatan sampah medis ini meningkat 30%. Dan sekarang di daerah-daerah saya lihat di TV dan sebagainya termasuk juga di Bali banyak juga yang tercecer. Apakah kita tidak punya terobosan untuk sesegera mungkin membangun unit-unit pengolahan sampah medis yang beracun. Ini penting sekali jangan sampai sampah ini terus jadi masalah setiap tahun. Di Jawa saya lihat tadi malam juga begitu. Nah, kenapa sih kita bangsa yang maju ini tidak bisa melihat negara-negara lain yang maju, yang sudah mempunyai tempat pengolahan-pengolahan sampah yang modern sekali, masuk ke mobil sudah diolah sampahnya di dalam mobil yang kemudian di tempat pembuangannya tinggal di olah lebih lanjut. Nah, inilah yang saya mohonkan kita harus maju kedepan dengan mengedepankan teknologi, sehingga sampah ini tidak lagi menjadi masalah nasional.

Sekian Ibu Menteri.

Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Ibu Renny silakan, jauh-jauh dari Palembang.

F-GERINDRA (RENNY ASTUTI, S.E., S.PN.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang saya hormati Ibu Menteri beserta jajarannya.

Saya hanya sedikit saja pertanyaan Pimpinan. Saya melihat data pelepasan kawasan hutan yang kita terima pada hari ini, pada rapat yang lalu Ibu Menteri mengatakan bahwa di tahun-tahun terakhir ini tidak ada pelepasan hutan, tetapi di Sumatera Selatan Ibu, karena ini Dapil saya, saya lihat ini di tahun 2019 itu ada pelepasan kawasan hutan milik PT. Hindoli dan PT. Sari Persada Raya. Saya mohon penjelasan Ibu, karena penjelasan rapat yang lalu dengan data yang kami terima hari ini berbeda.

Kemudian yang kedua Ibu, saya mewakili Suku Anak Dalam Ibu, kebetulan ada suku anak dalam kemarin saya pulang ke Dapil itu menemui saya, ini Suku Batin Sembilan ini mereka menyampaikan mengenai hutan harapan Ibu. Jadi hutan harapan ini Ibu sudah memberikan ijin pelepasan kawasan hutan untuk jalan tambang. Nah, suku anak dalam disini salah satunya Suku Batin Sembilan ini menyampaikan kepada saya Ibu, karena mereka hidup di dalam kawasan hutan ini, ini kalau kami di Sumatera Selatan menyebutnya Suku Kubu Ibu. Jadi mohon ditinjau kembali Ibu, SK yang sudah Ibu keluarkan untuk jalan tambang di kawasan utan harapan ini.

Itu saja Pimpinan yang saya sampaikan.

Terima kasih.

*Billahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Sebelum ke Bapak A. A. kami persilahkan Ibu Anggi, karena mau rapat Fraksi, silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya hanya mau meng-*highlight* saja dari temen-temen tadi bicara tentang betapa kerusakan lingkungan sangat tinggi. Kemarin di rapat sebelumnya saya minta untuk ada kajian dan saya berharap itu juga akan segera ada hasilnya. Lalu yang kedua, tentang kesehatan masyarakat. Jadi kesehatan masyarakat seringkali diabaikan dalam terutama di komunitas-komunitas masyarakat di hutan. Tadi misalnya Mbak Renny bicara tentang Suku Anak Dalam, kita juga seringkali *ignore* terhadap kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungannya kita bicara tentang tentang lingkungan, bicara tentang sampah, bicara tentang manusianya, kita tidak memperdulikan tentang bagaimana kesehatan mereka. Oleh karena itu, mohon nanti kita punya abdi rimbawan mungkin ya ini salah satu contoh saja, mungkin Ibu menteri dan semua bisa menggali kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian untuk bisa membangun itu. Kita bagus untuk selalu meningkatkan ekonomi, tetapi kesehatan sangat penting, itu pertama.

Lalu kedua, selalu mendapati kalau Pak Edward tentang penanaman itu ketika tidak proper ya, tidak pas waktunya. Nah, ada sebagian yang lain ketika pas penanaman rehabilitasi hutan itu ketika sudah Desember hujannya lebat-lebatnya, benihnya tumbuh itu tidak sempat karena pasti sudah tergerus oleh air dan itu seterusnya. Artinya apa? Mohon kebijakannya ketika mau

memberikan bantuan benih ya, bantuan bibit ya, itu disesuaikan dengan apa musimnya jangan pas kemarau-kemarau sehingga tidak bisa duduk kalau bahasa Jawa itu, digali kalau bahasa Indonesia atau ketika hujannya deras-deras ketika Desember, ketika habis ditanam habis itu hujan, hilang deh nggak jadi. Jadi mohon untuk bisa *timing*-nya itu bisa bener-bener pas, menjelang musim penghujan atau pasti Bapak dan Ibu tahulah seperti apa di beberapa tempat. Saya pikir itu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Gus A. A. PKS Andi Akmal maksudnya.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Kalau di Dapil bukan A. A. Pak Ketua, AAP.

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Ibu Menteri beserta jajaran.

Saya tidak pendalaman Bu Menteri, hanya menyampaikan beberapa saran dan mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti untuk kinerja Kementerian LHK ke depannya.

Yang pertama, kita tahu bahwa masalah lingkungan hidup ini banyak sekali dihadapi oleh daerah-daerah. Dan sayang sekali anggaran daerah untuk itu sangat minim, jadi hanya ada 500 juta, ada cuma 300 juta pertahun, sehingga masalah-masalah lingkungan hidup, persampahan, masalah-masalah limbah tentu tidak akan cukup dengan anggaran tersebut. Karena itu Ibu Menteri, kita mendorong Kementerian LHK untuk berbicara dengan Menteri Keuangan agar menambah porsi DAK-nya Ibu, Dana Alokasi Khusus untuk LHK untuk ke daerah. Dan sebagaimana kita tahu bahwa tahun ini hanya Rp500 miliar tentu kita berharap bahwa isu lingkungan ini sudah sangat penting. Dan daerah juga bisa merasakan bahwa pusat ini perhatian dengan mereka Bu ya. Kita berharap disana kami bangga juga nanti akan mendorong teman-teman agar ini disuarakan juga agar Pemerintah Pusat betul-betul perhatian terhadap masalah lingkungan hidup ini. Itu yang pertama Ibu Menteri.

Yang kedua, untuk BRG karena sekarang namanya jadi BRGM mangrove ya. Jadi saya berharap BRG ini jangan hanya berbicara Kalimantan sama Sumatera Pak, Indonesia inikan seluruh, Sulawesi juga tentu juga ada mangrovenya juga. Ibu Alien di Maluku juga ada mangrovenya, di Jawa juga apalagi, Papua juga. Oleh karena itu Pak, programnya jangan hanya Kalimantan sama Sumatera Pak, kalau bisa Dapil seluruh Anggota Dewan ini

ada semua program untuk mangrove, karena tidak ada gambutnya. Itu yang kedua.

Yang ketiga, kemarin kami dapat juga aspirasi waktu kunjungan Dapil Ibu Menteri, agar sosialisasi mengenai masalah persampahan ini kepada ibu rumah tangga, kepada sampah rumah tangga, kepada LSM maupun pada mahasiswa. Mungkin nanti bisa semua Dapil ini diadakan sosialisasi di Dapilnya masing-masing agar kesadaran tentang sampah ini betul-betul menjadi kesadaran bersama, bukan hanya pemerintahnya yang semangat tapi rumah tangga tidak semangat atau pencinta lingkungan tidak semangat.

Saya kira itu saja Pak Ketua, beberapa saran dari saya Ibu Menteri.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Dokter Hewan Slamet, 3 menit.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Anggota yang terhormat.

Kalau bisa ini masih ada kurang lebih 6 penanya, kalau 6 kali 3 sama dengan 18 menit. Setelah itu kesimpulan, saya berharap pul 13.00 WIB itu sudah selesai, kemudian kita Ishoma, setelah itu kita masuk lagi pukul 14.00 WIB.

Pak Slamet silakan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih Pak Ketua.

Ibu Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati.

Sedikit saya terkait dengan kalau KLHK sudah banyak di singgung. Ke BRGM Ketua, jadi yang ingin saya tanyakan struktur dari BRGM ini terkait dengan penganggaran. Karena dari yang disini terlihat tidak ada anggaran mangrove, tetapi di halaman berikutnya ada anggaran mangrove. Nah, yang menjalankan mangrove siapa? kalau di anggaran digambutnya jelas ini, Deputi Bidang Perencanaan ada ini ada sementara gambut tidak ada. Nah, saya ingin tanyakan strukturnya dan ini yang tanggung jawab terhadap pelaksanaan dana mangrove ini di siapa. Itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Mas Bambang silakan.

Pak Dedi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik, terima kasih.

Ibu Menteri yang saya hormati.

Yang pertama, bahwa setiap tahun baik kepemimpinan Ibu maupun sebelumnya itu pasti ada reboisasi. Pertanyaan saya adalah dari hasil reboisasi itu berikan data sudah berapa ratus ribu pohon yang tertanam, diameternya sudah berapa, dan letaknya di mana saja. Sehingga ketika kunjungan suspek kami, kami bisa melihat keberhasilan reboisasi dari tahun ke tahun. Kalau ternyata reboisasi tidak berhasil, maka tidak boleh lagi ada penebangan hutan, karena apa makna reboisasi dibanding dengan jumlah pohon yang ditebang. Jumlah pohon yang ditebang ratusan ribu hektar, sedangkan reboisasi belum tentu 1 hektar berhasil. Ini yang pertama.

Yang kedua, waktu kunjungan kami ke Lamandau bertiga. Sepanjang jalan itu ada perkebunan kelapa sawit yang tidak ada satupun pohon. Berdasarkan data yang kami miliki dan pohon itu sampai ke pinggir, kemudian di bukit-bukit itu perkebunannya illegal. Apa langkah Kementerian terhadap berbagai kegiatan-kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat.

Kemudian yang berikutnya adalah hutan. Dalam pandangan yang harusnya diberikan ijin di hutan kanivan itu 8.000 hektar, tapi faktanya diberikan 19.000 hektar, 10.000 hektar itu sudah *land clearing*, sudah bersih. Dan saya meminta pada waktu itu dengan Pak Darori untuk sisanya itu tidak boleh lagi ditebang karena itu biarkan milik publik. Kenapa ngotot pengusahanya pengen nebang, karena pohon ulin yang besar-besar. Ulinnya hebat, gede-gede, dan masyarakat disitu berjuang mempertahankan pohon ulin sebagai pohon adatnya. Kalau ini dilepas lagi kita sudah memberikan lagi kontribusi negatif bagi bangsa ini.

Waktu itu saya di barang dengan Pak Wamen, pertanyaan saya adalah apa tindak lanjut dari pertemuan waktu itu, karena sampai hari ini kami tidak pernah mendapat laporan atau tindakan apakah yang setengahnya lagi dicabut lagi ijinnya atau apa tindaklanjutnya. Dan menurut saya saatnya negara berpihak pada rakyat dan kaum adat, tidak terus-menerus memikirkan kepentingan hanya perorangan di situ.

Nah, kemudian yang terakhir hari ini Bu Menteri. Kita tahu bencana di mana-mana, di Jawa, di luar Jawa, di berbagai tempat. Menurut saya permasalahannya cuma satu hancurnya tata ruang, sehingga berulang-ulang saya bicara Kementerian Lingkungan Hidup harus mengambil alih. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru tata ruang merupakan

kewenangan Pemerintah Pusat dan tahun ini harus ada evaluasi terhadap seluruh tata ruang. Jangan biarkan negeri ini terus dalam setiap tahun ditimpa bencana. Hari ini di wilayah utara Jawa Barat hampir lebih dari 10.000 hektar sawah siap panen tenggelam.

Itu saja, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ibu Nur'aeni.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati beserta Anggota,
Ibu Menteri beserta jajaran Eselon I.

Langsun saja dari saya, setelah kemarin melalukan rapat dengan Ibu Menteri dan saya pun sudah mendalami jawaban yang diberikan. Pertama, ingin menanggapi serta ingin minta adanya suatu ketegasan jawaban, karena ini belum puas jawaban yang disampaikan. Kaitan dengan dana reboisasi, kita tahu bahwa KLHK juga menganggarkan Rp1,9 triliun untuk program reboisasi. Sementara begitu saya mendalami jawaban, bahwa reboisasi ini juga didapatkan dari pendapatan jasa giro dana reboisasi di samping itu juga ada skema pinjaman dana bergulir. Yang ingin saya pertanyakan di samping program serta locus dan jenis tanaman apa saja yang telah dilakukan dari program tersebut. Karena di wilayah Banten di Lebak kemarin juga terjadi banjir dan longsor, apakah dengan banjir dan longsor kemarin diberikan program tersebut. Ini jawabannya harus jelas ya karena saya tidak mau bahwa ternyata dengan dianggarkan 1,9 ada juga dana-dana yang lain, khawatir ini tumpang tindih.

Berikutnya Ibu Menteri, dari jawaban juga yang disampaikan oleh Dirjen Gakkum di mana tadi yang bisa ditanyakan Pak Dedi, Ibu Alien, termasuk Partai Demokrat ini juga tidak memberikan jawaban yang tegas. Sebetulnya ada Rp19,3 triliun dana yang menguap yang tidak bisa dieksekusi oleh Kementerian LHK dengan alasan-alasan yang klise saya kira. Seperti misalkan keterbatasan kewenangan, di samping itu katanya rotasi Ketua Pengadilan Negeri sangat cepat. Terus untuk perusahaan yang ingin membayar ini belum ada kejelasan dari Kementerian Keuangan RI, mengenai durasi pembayaran nilai ganti rugi. Nah, pertanyaan saya apa sebetulnya tindakan konkrit atau rencana ke depan Ibu Menteri terhadap Ditjen Gakkum ini yang memang negara saat ini melihat kondisi masyarakat kita sedang dilanda banjir, penebangan hutan illegal tetapi negara tidak mampu untuk bisa melakukan eksekusi. Harus secepatnya ini Ibu Menteri, kalau dibiarkan

saya kira sayang sekali. Di saat negara tidak punya uang untuk memberikan anggaran lebih kepada KLHK, sementara sisi yang lain tidak sanggup dan tidak mampu. Saya kira perlu dievaluasi ini Ditjen Gakkum untuk kinerjanya Ibu Menteri.

Di samping itu kaitan dengan program nasional, *food estate*, pemindahan rencana pemindahan ibukota, mohon sekali untuk dapat dievaluasi. Mengingat dari jawaban yang diberikan juga ternyata program atau kebijakan *Food Estate* ini jika tidak mampu dari sisi program untuk bisa melaksanakan kegiatan sekat kanal yang nanti akan dilokasikan di sana. Ini mohon untuk dievaluasi sementara untuk kebijakan pemindahan ibu kota ini juga dievaluasi, mengingat situasi dan kondisi saat ini belum tepat saya kira untuk bisa bagaimana merencanakan pemindahan ibu kota negara, sementara anggaran dibutuhkan ini cukup besar. Alangkah lebih elok anggaran ada dialokasikan terhadap pemulihan ekonomi nasional untuk masyarakat kita.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Tuan guru Rudi.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ibu Menteri, karena tadi banyak yang menyampaikan kepada Ditjen Gakkum. Saya hanya menyampaikan minta bantuan pada Dirjen Gakkum agar bisa mengawasi ada salah satu tambang di daerah pemilihan saya itu lebih besar dari pada AMT Tambang Mineral Nusa Tenggara Newmont. Sekarang sedang akan berjalan, yaitu di Kabupaten Dompu, yaitu Sumbawa Timur Mining, sangat besar sekali lebih besar dari Newmont. Saya minta tolong Bapak Dirjen Gakkum ikut membantu mengawasi supaya tidak salah yang disampaikan kepada teman-teman tadi karena itu sangat besar sekali. Sudah mau berjalan jangan sampai kedepan banyak disampaikan oleh teman-teman ini. Saya kira itu saja.

Terima kasih Ibu Menteri, Pak Roy.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pak Rudi, kawasan apa yang ditambang itu.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Kenapa Pak Ketua?

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Kawasannya kawasan apa?

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Kalau saya belum sampai kesana terlalu detail karena seijin Komisi dan Ketua. Tapi saya sebagai orang kampung memonitor itu, sangat besar sekali.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Nanti kunjungan spesifik sama saya.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Itu yang paling penting, di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Lebih besar dari Newmont sekali lagi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Mas Bambang silakan, 2 menit Mas.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Bismillahirrahmanirahi.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota, serta Ibu Menteri dan seluruh jajarannya.

Kami mengulang lagi Ibu, terkait dengan kebijakan KLHK bahwa bencana terjadi dimana-mana. Tentu ini terkait dengan kegiatan yang menggunakan lahan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan sehingga mengakibatkan bencana yang luar biasa. Dalam kasus ini tentu KLHK harus punya *planning* yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau ini jangka panjang memang sudah ada kegiatan reboisasi, tapi jangka pendek ini belum nampak. Saran saya ini membuat sumur-sumur serapan. Kalau Kepala Daerah menyarankan itu Bu, pengalaman saya tidak dihargai karena ijin dari pusat, baik tambang maupun perkebunan. Oleh karena itu, kemarin saya sampaikan agar ada Instruksi

Presiden, sehingga perusahaan itu bisa melakukan ketika ada Instruksi Presiden tentunya ini lebih dipatuhi oleh para pengusaha kita, sehingga bisa meminimalisir bencana yang terjadi.

Kemudian yang kedua, kembali lagi saya juga mengingatkan di BRG. BRG ini program sumur bor di Kalteng itu sudah cukup banyak, tapi tidak efektif ini berkali-kali saya ingatkan. Oleh karena itu, tentu ini perlu terobosan baru seperti yang pernah kami sampaikan perpipaan, sekali bangun memang mahal tapi ini jangka panjangnya akan lebih efektif. Kemudian juga harapan saya BRG bisa lebih fokus untuk melakukan pengawasan terhadap lahan-lahan gambut yang luasnya cukup luar biasa.

Kemudian juga yang ketiga, program TORA. ini program yang sangat bagus dan sangat diharapkan oleh masyarakat Kalimantan Tengah, karena kebanyakan masyarakat di sana lahan usahanya masuk dikawasan hutan. Sehingga dengan TORA ini tentu ini solusi yang tepat yang ditawarkan oleh Pemerintah. Hanya saja ini kalau tidak diawasi pelaksanaannya ini akan potensi dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk melepaskan kawasannya, dan ini hasil evaluasi saya di lapangan sudah mulai terjadi. Oleh karena itu, saya minta supaya nanti diverifikasi ulang usulan dari daerah.

Saya kira itu yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Mbak Tris, 2 menit.

Karena jam 13.00 WIB harus selesai.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan, rekan-rekan Anggota dan Ibu Menteri beserta jajaran.

Saya langsung saja Bu, terkait masalah apa namanya APBN 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengkonsentrasikan untuk apa namanya pemulihan ekonomi nasional dengan menempatkan Ditjen Konservasi, diantaranya programnya adalah untuk pengembangan ekonomi produktif. Dari bagian itu menjadi bagian dari pada aspirasi para Anggota, sampai hari ini kami belum bisa mengkomunikasikan dengan masyarakat atau dengan Pemerintah Daerah karena belum memahami bagaimana bentuk programnya. Mohon dijelaskan supaya kami juga mudah untuk mengkomunikasikannya.

Yang kedua, masih tetap di Ditjen Konservasi, dalam rangka ulang tahun partai saya PDI Perjuangan, kami di Dapil menanam pohon di Taman Nasional Gunung Ciremai, yang 2 tahun yang silang terjadi kebakaran. Sekitar 250 hektar sampai hari ini belum tersentuh untuk perbaikan untuk apa namanya apa memperbaikinya. Sudah kering dan dekat dengan perbatasan Kuningan, menurut Kanit Intel Polres ini sangat rentan terhadap terjadinya kebakaran. Usul saya adalah apakah tidak mungkin di sana untuk di kembangkan program kebun bibit rakyat, karena kalau kita laksanakan oleh Pemerintah beban anggaran yang sangat tinggi. Dengan kebun bibit rakyat, rakyat pun juga ikut bisa memelihara itu. Kemudian juga dalam mengamankan kemungkinan terjadinya kebakaran, masyarakat peduli api pun juga perlu diberikan perhatian sehingga mereka juga setiap saat juga pergi kesana.

Yang ketiga, tanggal 3 April 2020 saya meneruskan permohonan Bupati Subang tentang permohonan rakyatnya untuk mendapatkan ijin pemanfaatan hutan perhutanan sosial yang sampai hari ini belum ada jawaban. Saya ditanya terus juga tidak bisa berikan jawaban. Saya mohon bisa tidak bisa ya tolong dijawab, supaya juga ada dasar untuk menindaklanjutinya.

Yang terakhir Bu, kita dan Ibu dengan Pemerintah memanfaatkan hutan untuk *Food Estate* tidak disadari hutan dalam pengelolaan Perhutani, hutan dalam pengolahan PTPN banyak yang tidak dimanfaatkan, gagal menanam kebun karet. Mohon ini dimanfaatkan karena kita juga khawatir kekurangan pangan.

Terima kasih Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Bagaimana maksudnya tadi Pak, kawasan apa Pak?

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Perhutanan Sosial.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Bukannya Bapak ngomong tadi PTPN.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Iya, jadi kawasan hutan yang terlantar yang dikelola Perhutani yang dirubah menjadi kebun karet, kebun karetnya gagal kemudian ditelantarkan. Begitu juga dengan kebun tebu yang tidak dimanfaatkan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Oke, terima kasih Pak Sutrisno.

Disini juga hadir dari Perhutani dan Inhutani. Coba tolong dijelaskan nanti kami juga diberikan data luasan wilayah yang dikelola maupun yang belum terkola dengan kata lain yang diterlantarkan.

Silakan dari Perhutani atau Inhutani dulu silakan.

Sebutkan namanya, pindah kesana itu ada mic supaya jelas, karena ini direkam semuanya.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Ijin Bapak Pimpinan.

Nama saya Wahyu Pak, selaku Direktur Utama Perum Perhutani.

Mohon ijin Ibu Menteri, untuk memberikan penjelasan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bapak Anggota Dewan, kami di Perhutani itu mengelola hutan di Jawa dan Madura seluas 2,4 juta berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2010. Saat ini sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja sedang dirumuskan kebijakan untuk Pemerintah mengambil sebagian lahan kelolaan Hutan Perum Perhutani yang 2,4 juta itu kira-kira akan berkurang sebesar 1 juta untuk dikelola sebagai cadangan Perhutanan Sosial.

Nanti Pak, kami coba akan cek info tadi terkait dengan dulu memang pernah beberapa lahan hutan ditanami karet dan tidak berhasil. Kami akan coba tapis apakah itu menjadi objek yang nantinya akan menjadi kelolaan Pemerintah untuk cadangan perubahan sosial. Mungkin sementara itu Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Inhutani silakan.

DIREKTUR UTAMA PT INHUTANI I (Ir. AGUS SETYA PRASTAWA, M.B.A.):

Terima kasih Pak.

Kami dari Inhutani I, nama saya Agus Prastowo.

Terkait dengan karet Pak, kami punya tanaman karet di Kalimantan Timur Pak, ini sekitar 2.000 hektar. Dan sekarang ini apa namanya kita kemarin karena harga karet masih rendah Pak, kita akhirnya masih slow down produksinya karena kami kira kalau produksi malah rugi untuk sementara karena harga belum membaik Pak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat harga bisa membaik kita bisa mulai memproduksi Pak.

Demikian, terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Secara keseluruhan berapa luasan Inhutani yang dikelola?

DIREKTUR UTAMA PT INHUTANI I:

680.000 hektar dan itu sebagian besar hutan alam Pak.

KETUA RAPAT:

Inhutani?

DIREKTUR UTAMA PT INHUTANI I:

Iya.

KETUA RAPAT:

Cuman 680.000?

DIREKTUR UTAMA PT INHUTANI I:

Iya Pak.

KETUA RAPAT:

Termasuk di Sumatera?

DIREKTUR UTAMA PT INHUTANI I:

Kita Inhutani I Pak, di Kalimantan Timur dan Kaltara.

KETUA RAPAT:

Lima, coba jelaskan. Jadi gini, jelaskan dulu saja.

DIREKTUR UTAMA PT INHUTANI V (Ir. BAKHRIZAL BAKRI, M.M.):

Terima kasih Pak.

Saya Rizal dari Inhutani V, kawasan kami ada di Bangka dan di Lampung Pak. Lokasi kita di Lampung ada 55.000 hektar dan di Bangka ada 16.000 untuk pengelolaan areal. Di kami ini sebagian besar memang kemitraan dengan masyarakat. Dan kita juga ada mitra juga swasta, ini yang kita lagi kelola supaya bagaimana areal yang semua ini bisa kita kelola dengan baik Pak. Sehingga masyarakat bisa kita kelola juga, jadi kita usahakan Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi selama ini mengelolanya kurang baik ya.

DIREKTUR UTAMA PT INHUTANI V:

Masih kurang baik Pak, karena dikuasai oleh masyarakat Pak.

KETUA RAPAT:

Ya gimana mohon maaf ini, masyarakat itu kalau ada peluang dia akan menempati dan mengelola tanah tersebut. Kedua, kemungkinan besar ada oknum dilapangan yang bermain. Jadi baik I, II, III, IV, V saya minta datanya. Termasuk juga Perhutani berapa luasan yang dikuasai, berapa luasan yang dikuasai oleh oknum, berapa yang dikuasai oleh masyarakat. Yang penting Bapak-bapak hadir disini kami berikan kesempatan untuk ngomong, supaya kami tahu permasalahannya. Untuk detailnya nanti di masa sidang yang akan datang khusus Inhutani dan Perhutani kami undang khusus.

Terima kasih.

Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat.

Diperkirakan konon 1 juta ada untuk Perhutanan Sosial. Kenapa dari 1 juta itu nggak dipotong 20% untuk *Food Estate* di pulau Jawa, kenapa harus di Kalimantan. Kemarin dalam Rapat Kerja saya, saya katakan seandainya 1 hektar menghasilkan 5 ton di *Food Estate* di Kalimantan dikali sekian ratus ribu hektar yang konon katanya terus hasilnya dibawa kemana. Sebagian besar kan di Pulau Jawa, bagaimana transportasinya, berapa ongkosnya. Misalnya dari Pulang Pisau ke pelabuhan, ke pelabuhan ke Surabaya lah umumnya kalau Indonesia timur, ke Surabaya dibawa ke Jawa ke Semarang atau ke mana. Inikan harus dihitung ongkos angkut.

Demikian tanggapan dan pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI. Selanjutnya silakan Menteri memberikan jawabannya.

F-PKB (IRMAWAN, S.Sos., M.M.):

Ijin Ketua.

Irmawan di sini mau berkenalan sebentar dengan Ibu Menteri.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKB (IRMAWAN, S.Sos., M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Ibu Menteri, kebetulan saya Anggota baru di Komisi IV DPR RI ini. Nama saya H. Irmawan dari Daerah Pemilihan Dapil I Aceh. Dalam kesempatan ini juga ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan kepentingan di Dapil Pak.

Pertama, di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, hari ini konflik satwa dengan manusia semakin tinggi volumenya, termasuk di Bener Meriah di Aceh Tengah, kemudian Gayo Lues di Aceh Tenggara. Harimau, gajah turun kepemukiman masyarakat sehingga ini membuat masyarakat menjadi resah. Ini adalah merupakan signal kepada kita bahwa habitat satwa ini terganggu dikawasan ini Ibu. Oleh karena itu, kami berharap kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup agar untuk bisa memaksimalkan perannya dalam rangka mengawal hutan ini sehingga tidak diadakan lagi penebangan liar, sehingga satwa ini tidak mengganggu pemukiman masyarakat. Itu satu.

Kemudian yang kedua, di Kabupaten Gayo Lues mulai dari tahun 2019, 2020, 2021, ada program reboisasi. Hampir di semua kecamatan yang ada di kabupaten Gayo Lues Ibu Menteri. Dan kalau saya tidak salah menurut laporan yang saya terima hampir sampai Rp60 miliar anggaran yang sudah teralokasikan. Menurut laporan yang kami dapat banyak ini bibit-bibit yang disalurkan ini yang tidak sesuai dengan kondisi alamnya, sehingga tidak maksimal dan kebanyakan ini gagal tanam. Jadi oleh karena itu, kedepan ini perlu dievaluasi kembali tentang laporan masyarakat ini.

Saya pikir ini Ibu Menteri.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Irmawan.

Selanjutnya dijawab, waktunya 15 menit setelah itu kita buat kesimpulan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Pertanyaan sama dibuat satu saja Ibu biar cepat selesai.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih.

Pimpinan yang kami hormati,

Ibu dan Bapak Anggota yang saya hormati.

Saya mengucapkan terima kasih atas catatan-catatan kritis dan diantara persoalan-persoalan yang diutarakan kami akan rapatkan dan nanti secara keseluruhan nanti kami akan laporkan secara tertulis.

Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang terhormat.

Saya mohon izin untuk memberikan juga beberapa *highlight* saja. Pertama, bahwa refocusing ini sudah diupayakan penghematan yang tidak mengganggu prioritas nasional, tidak mengganggu prioritas bidang LHK juga, tidak mengganggu program strategis, dan tidak mengganggu juga agenda-agenda dengan pemberdayaan masyarakat. Itu sangat kami perhatikan dan kita sudah mengupayakan.

Yang kedua, persoalan-persoalan kawasan-kawasan ilegal di dalam kawasan hutan. Saya mohon izin untuk menyampaikan *overview*-nya saja, bahwa kita tahu bahwa ini masalah kumulatif dan memang ada proses-proses terkait dengan *dispute* peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang 41 dikatakan bahwa persoalan-persoalan illegalitas bisa dilakukan dengan non litigasi. Tapi di Undang-Undang 18 Tahun 2013 ditegaskan bahwa itu harus pidana. Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja kemudian mengambil posisi dan kita sekarang sudah bisa punya pijakan untuk menyelesaikan itu. Jadi kami akan terangkan secara lengkap nanti di dalam catatan-catatan yang tertulis saya akan lihat betul satu per satu.

Kemudian tentang limbah medis, memang saya memperhatikan betul, kami memperhatikan betul ketika terjadi COVID di bulan Maret-April kita sudah mulai turun mempersoalkan. Dan seperti Bapak-Ibu yang terhormat, ketahuilah bahwa persoalan-persoalan ini terkait dengan Pemerintah Daerah, dengan rumah sakit, dengan masyarakat. Oleh karena itu, *guidance* kami perketat dan data juga dari daerah kita monitor. Memang betul tadi yang disampaikan, bahwa ada gap antara kapasitas dan masalah, yaitu 900 ton perhari limbahnya dengan kapasitas 470 ton perhari. Dan itu sudah kita terus antisipasi, kami terus berkomunikasi juga dengan Menristek, LIPI juga menyiapkan peralatan, kita juga melakukan relaksasi perijinan. Jadi KLHK sudah terus berupaya, misalnya insenerator untuk infeksius, benda tajam, patologi, farmasi, genotoksik dan autoklaf.

Pak Ketua dan Ibu-Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Kita memantau terus tentang limbah medis ini termasuk juga saya mengikuti berita-berita tentang limbah-limbah ataupun sampah yang berserakan di tepi jalan. Memang sedapat mungkin di kontrol dulu bagaimana pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah dan nanti pada hal-hal tertentu seperti pernah terjadi 2 tahun lalu 1.500 ton di Jawa Timur itu bisa ditangani dengan perintah oleh Menteri untuk didukung oleh swasta misalnya oleh pabrik semen dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kami memperhatikan hal-hal seperti ini.

Kemudian tentang RHL, rehabilitasi hutan dan lahan itu ada standarnya. Saya senang sekali kalau nanti memang harus dilaporkan dan saya kira itu sangat betul, karena di waktu yang lalu kita pakai programnya, misalnya satu miliar pohon, sekian ratus juta pohon, tapi belum berefleksi kepada luasan. Sebetulnya di kami mengupayakan untuk merefleksikan itu kepada luasan. Oleh karena itu, di dalam standar itu ada P0, P1, P2, jadi kita baru bisa mengatakan bahwa ini berhasil di tahun yang ketiga akhir atau masuk di tahun yang keempat. Tapi tentu saja betul bahwa setiap kali penanaman harus dilihat berapa tingkat kematiannya, termasuk misalnya seperti yang di Bandara Yogyakarta itu juga cukup berat.

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri, pandangan anda sebagai Menteri kira-kira berapa persen misal yang ditanam melalui reboisasi berapa persen yang berhasil, berapa persen yang gagal.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Pak Ketua, kalau secara keseluruhan betul-betul harus kita pelajari sampai tahun ketiga. Tetapi yang di tahun pertama saya selalu tanyakan juga kepada Dirjen.

KETUA RAPAT:

Oke, yang tahun ketiga berarti dari 2014-2019, berapa persen?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Antara 70%-80%.

KETUA RAPAT:

Oke, saya meminta kepada Sekjen untuk membuat hitungannya. 2014-2019 80% dari luasan berapa, dananya berapa, tadikan Ibu bicara bukan pohon tapi luasan. Luasan itu nanti akan ketemu 1 hektar berapa batang pohon dan anggaplah 70% kita minta laporannya.

Lanjutkan Ibu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua.

Saya kira nanti kita harus analisis ya Bapak Dirjen.

Kemudian terkait dengan Gakkum, saya akan diteliti betul. Beberapa hal tadi yang dipersoalkan kami akan saya akan rapat dan kalau perlu saya kira dievaluasi keseluruhan saja sama wilayah-wilayahnya, sama kepala desanya juga, sama tokoh-tokohnya juga, sehingga persis apa sih yang sesungguhnya terjadi, tentu saja termasuk perijinannya. Jadi saya kira

dengan situasi itu kami nanti akan mempersiapkan dulu Ketua dan Bu Alien, saya coba cek lagi persisnya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Interupsi, boleh?

KETUA RAPAT:

Siapa itu?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Saya Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Ibu Menteri, banyak mana mengeluarkan ijin masa kepemimpinan Ibu dan sebelum kepemimpinan Ibu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Kita sudah menahan begitu rupa, kalau lihat datanya jaman yang dahulu jauh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Maksud saya banyak mana mengeluarkan ijin Ibu sebelum jadi Menteri atau Ibu sesudah jadi Menteri. Jawab saja Ibu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Datanya nanti saya kirim datanya saja Pak Dedi yang terhormat.

Ketua, saya mau melapor yang Minamata karena terkait anggaran dan refocusing. Minamata ini konvensi internasional dan kita sudah putuskan untuk *hybrid*. Dan hanya sebagian orang sudah kita ambil nanti kita akan lihat lagi, teliti lagi dan itu nanti yang direvisi untuk tadi yang diminta untuk apa namanya bangun untuk desa bangun untuk dan lain-lain dan lain-lain. Saya kira itu bisa sekarang.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Slamet apa yang mau ditanyakan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bukan bertanya Pak, mempertegas. Sebenarnya pertanyaan Bapak Dedi itu bis dijawab oleh Ibu Menteri sekarang tidak perlu mengirim data karena datanya sudah ada disini, tinggal menjawab saja Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jawab saja Ibu Menteri nggak apa-apa kok, kita di era keterbukaan agar semua mengetahui. Kalau disembunyikan pun percuma karena sekarang ini semua serba terbuka.

Silakan Ibu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Iya, kita musti paham dulu. Di Kehutanan itu ada pemanfaatan, ada penggunaan. Ada yang pinjam, ada yang dilepaskan. Semua perijinan itu apakah HPH, HPI, IPPKH, pelepasan itu di era saya itu sudah sangat kecil. Kalau datanya ada itu pasti juga ijin prinsipnya sudah ada sebelum. Jadi saya kira, kami berusaha untuk mengontrol membuat jadi baik dan itu tidak terlepas dari arahan Komisi IV DPR RI. Karena Komisi IV DPR RI kalau menanyakan inikan kencang sekali dan saya kira itu memang sangat baik untuk mendorong KLHK lebih baik.

Terima kasih Ketua.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ijin Pimpinan.

Saya tadi menanyakan tegas tentang bagaimana hasil dari 5 tahun terakhir ini penanganan Gakkum sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditetapkan ini belum dijawab sama Ibu Menteri. Terus juga saya ingin ini harus dijawab secara lisan dan juga tertulis, tapi kalau bisa penegasannya secara lisan karena ini kalau kita menanggapi lagi jawaban-jawaban dari kementerian inikan kalau secara tulisan ini hanya asal-asalan saja. Jadi tolonglah Ibu Menteri, saya minta untuk dijawab pertanyaan saya tadi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jawab saja Ibu, nggak apa-apa.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Yang ditanya itu kan persoalan-persoalan pidana, jadi itu terkait dengan data. Tapi saya kira saya tadi sudah mengatakan bahwa kita punya *dispute* regulasi. Kita juga punya *dispute* kebijakan Pemerintah ketika terjadi desentralisasi. Ingat bahwa jaman itu ijin kehutanan oleh Bupati, jadi memang saya betul-betul harus lihat banget Pak, satu per satu, kasus per kasus, ini ijinnya siapa yang mengeluarkan. Waktu keluarin ini ada urutannya apa nggak. Nah, itu semua sudah dianalisis di Undang-Undang CK sehingga nanti itu akan diselesaikan. Tapi kalau datanya saya kira sebagian kelihatannya Pak Dirjen sudah lapor ke saya, bahwa sudah dikirimkan data ke Komisi IV DPR RI, tapi saya akan cek kembali.

Pada dasarnya saya sependapat karena Pemerintah tidak ada satu pun yang disembunyikan dari Pemerintah. Tidak ada satu pun yang kita ingin lindungi dan tidak benar ada tebang pilih. Kalau 4 perusahaan di Jombang itu kalau laporan Dirjen kepada saya akan dikembangkan kemudian, karena pada saat itu dorongannya begitu kuat, dorongan politiknya begitu bagus, maka secara bersemangat 4 itu diproses. Sambil berjalan kita dapat laporan lagi dari Ibu Dirjen Vivin bahwa sudah juga disiapkan langkah-langkahnya. Jadi yang limbah aluminium ya. Kemudian lahan terkontaminasi sudah dilakuka pembersihan di dua lokasi tahun 2019-2020 dan akan dilanjutkan di tahun 2021. Selain itu juga dilakukan pembangunan pengolahan limbah aluminium dalam bentuk koperasi.

Kemudian juga saya kemarin meminta, saya setuju tadi pandangan yang terhormat Anggota bahwa harus ada pemahaman dari semua pihak, sosialisasi. Saya mendukung sekali dan saya akan meminta Ibu Dirjen, kalau perlu dimulai saja bulan Februari-Maret ini untuk semacam sosialisasi *e-learning* nanti yang buka juga bersama Anggota di Dapil. Saya kira itu akan sangat baik, buat Pemerintah baik, buat masyarakat juga baik.

Dan yang terakhir Pimpinan mohon ijin, saya berterima kasih atensi untuk DAK. Saya sudah ini rasanya tahun ketiga saya meminta dukungan untuk kita memperkuat soal DAK. Kami akan membuat catatan kepada Menteri Keuangan dan saya juga mohon dukungan dari Komisi IV DPR RI kepada Badan Anggaran, bahwa persoalan lingkungan itu sebetulnya urusan wajib untuk kabupaten-kota. Artinya ap? artinya mereka punya kewajiban tapi kenapa karena dia *cost center* itu susah alokasi APBD-nya. Oleh kaarena itu, DAK tadi sangat simpati saya kira, kami coba dalam lagi apa namanya *exercises academic*-nya dan usulan-usulannya nanti kami mohon dukungan dari Komisi IV DPR RI. Karena ini juga menyangkut Dapil Bapak-Ibu yang terhormat, jadi kita kita pertajam di daerah karena aspek lingkungan itu betul-betul eksternalitasnya ada di wilayah masing-masing.

Saya kira itu Ketua, mohon ijin Ibu dan Bapak Pimpinan serta Ibu dan Anggota. Nanti yang lain-lain saya akan siapkan secara tertulis dan saya akan rapat-rapat dulu dengan para pejabat Eselon I secara detail.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tadi Ibu Menteri mengatakan yang mengeluarkan ijin kepala daerah bupati. Setahu saya itu bupati itu kalau mengeluarkan ijin lokasi pasti dibawahnya ada tulisan “apabila menyangkut kehutanan harus membuat surat pinjam pakai pelepasan hutan”. Ini yang tadi mengatakan, kenapa saya bilang tebang pilih, dilaporan ini yang dilaporkan cuma pinjam pakai kawasan hutan kebun tambang tetapi yang illegal tidak pernah dilaporkan. Tahu enggak kehutanan? tahu. Saya sama Pak Roy dua kali ke Kalimantan Tengah, tiga kali bahkan. Illegal nggak? Illegal, illegal kebun tapi tidak pernah dilaporkan disini. Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan nggak ada dilaporkan. Cantumkan kesimpulan rapat termasuk yang illegal dilaporkan.

Ya Kiki.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Yang masalah kehutanan sudahlah ya, saya Pak Sekjen, Ibu Dirjen tadi. Saya mengingatkan kembali yang paling penting Bu, saya mohon maaf kalau kurang berkenan bagi temen-temen yang lain, cuma sekali lagi saya tetap menekankan masalah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove butuh penguatan Bu. Kalau memang Bapak tidak sanggup dari APBN, cobalah cari solusinya Pak. APBN Bapak nggak bisa ngandalin, mungkin orang *care* tentang hutan tapi tidak semua orang *care* tentang mangrove ataupun gambut. Saya konsisten hari ini kalau memang kita peduli sama lingkungan dan ingin kedepannya ini punya *legacy* untuk anak cucu kita, tolong mangrove dengan gambut ini diperjuangkan betul.

Saya mohon ijin dengan Ibu Menteri, kalau memang tidak sanggup ijinlah kepala apa ini direktur apa namanya sih nggak pernah ngerti Kepala Badan gitu apa ya, supaya cari solusi. Karena gambut dan ditambah mangrove ini anggarannya tetap ini takutnya nanti keteteran. Itu saja.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kita bukan memisahkan, saya tetap satu kehutanan dan gambut sama restorasi gambut, tidak bisa dipisahkan. Bapak-Ibu dari dialog dan masukan Anggota Komisi IV DPR RI.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Ijin Pimpinan, cuman menyampaikan saja terima kasih atas dukungan Pimpinan kemarin. Jadi timnya Pak Helmi sudah datang di kampung kami di Jombang, meskipun solusinya memang membutuhkan intervensi dari PUPR, karena yang amblas dan jembatan yang patah. Tetapi terima kasih untuk Pak Helmi yang sudah memberikan beberapa hal masukan yang berarti.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, terima kasih.

Dari dialog diskusi, saran dan masukkan Anggota Komisi IV DPR RI, sebelum acara kita akhiri kami akan bacakan kesimpulan Rapat Kerja pada hari ini.

silakan.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Tampilkan.

1. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan penghematan belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 sebesar Rp519.378.525.000,00 (lima ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari pagu semula sebesar Rp7.957.114.783.000,00 (tujuh triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.437.736.258.000,00 (tujuh triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan Komposisi Eselon I sebagai berikut:

Para pejabat Eselon I tolong disimak dengan baik, karena menyangkut angka rumah tangga masing-masing.

- a. **Sekretariat Jenderal**, semula sebesar Rp546.509.240.000,00 (lima ratus empat puluh enam miliar lima ratus sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp528.105.633.000,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar seratus lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- b. **Inspektorat Jenderal**, semula sebesar Rp80.613.724.000,00 (delapan puluh miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp71.381.398.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**, semula sebesar Rp342.275.694.000,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh

empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp322.261.593.000,00 (tiga ratus dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- d. **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung**, semula sebesar Rp2.177.333.560.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.008.333.560.000,00 (dua triliun delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, semula sebesar Rp1.925.381.253.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.769.870.792.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, semula sebesar Rp410.303.585.000,00 (empat ratus sepuluh miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp395.384.387.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- g. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, semula sebesar Rp363.461.912.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp346.458.362.000,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- h. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, semula sebesar Rp344.665.771.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp324.435.771.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- i. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, semula sebesar Rp301.879.106.000,00 (tiga ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp282.209.106.000,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar dua ratus sembilan juta seratus enam ribu rupiah);
- j. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya**, semula sebesar Rp271.968.331.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp244.262.243.000,00 (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- k. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, semula sebesar Rp249.465.285.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp232.695.285.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- l. **Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi**, semula sebesar Rp317.017.832.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp311.186.938.000,00 (tiga ratus sebelas miliar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- m. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, semula sebesar Rp313.243.965.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp296.365.515.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah); dan
- n. **Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**, semula sebesar Rp312.995.525.000,00 (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp304.785.675.000,00 (tiga ratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Anggota, mohon persetujuan, apakah dapat disetujui?

Ibu Menteri, komentar.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih.

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

- 2. Komisi IV DPR RI mendukung usulan penambahan Pagu Anggaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove TA 2021 sebesar Rp1.841.670.800.000,00 sehingga pagu anggaran Badan Restorasi gambut dan Mangrove TA 2021 menjadi sebesar Rp2.146.393.475.000,00

Anggota, setuju?

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Maksudnya apa ini Ketua, kesimpulan ini mendukung atau gimana. Anggarannya dari mana dapatnya kalau kita dukung sampai Rp2 triliun.

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri, silakan komentarnya.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Pimpinan, saya mohon ijin kami memang melihat bahwa BRG ini sekarang mendapatkan mandat untuk mangrove. Dan Pemerintah juga tadi pandangan dari Pimpinan dan Anggota, bahwa kita harus memperbaiki mangrove kita. Seluruhnya 637.000 hektar dan kalau kita rentang *roadmap*-nya, maka tahun ini harusnya kita tanam 150.000 hektar. Jadi kami secara awal memohon dukungan dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota, bila ada peluang ini apakah untuk APBN ABT anggaran tambahan, apakah mungkin dari anggaran pemulihan ekonomi dan lain-lain. Jadi kami juga akan melaporkan juga kepada Bapak Presiden dan Menteri Keuangan.

Terima kasih.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Setuju Ketua, saya kira usulannya.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Tunggu dulu Bang, karena ini pertanyaannya begini, apakah dengan Rp2 triliun itu habis. Coba rencana kerjanya bagaimana, berapa luasan yang akan direhabilitasi, baik mangrove maupun gambutnya. Maka saya bingung kok tiba-tiba nongol angka begini. Coba butuhnya berapa, masa dari 300 sekian miliar, Rp312 miliar menjadi Rp2,14 triliun, coba rencana kerjanya bagaimana. Kalau kami mendukung ya mendukung saja nggak ada masalah, cuman kami ini jangan dibilang orang bodoh. Gitu nanti ada yang bertanya dari mana angka tersebut penambahannya, hitungan kerjanya bagaimana.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan, salah satu catatan saya tadi Pimpinan yang juga memang karena waktu belum dijawab adalah di sini sudah muncul angka dari mangrove-nya, tapi strukturnya juga nggak ada siapa yang jalanin, sementara kalau gambutnya sendiris udah detail ini datanya, sehingga ini juga memang kita perlu didalami lagi terkait dengan BRGM ini.

Itu Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kepala Badan mau menjawab Rp1,8 triliun.

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE (Ir. HARTONO, M.Sc.):

Terima kasih Pimpinan.

Ijin Ibu Menteri.

Pimpinan Komisi IV DPR RI yang saya hormati,
Bapak-Ibu Anggota Dewan Komisi IV DPR RI.

Ijinkan kami sedikit menjelaskan tentang usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,8 triliun ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Menteri, sebetulnya untuk rencana kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove yang dijadwalkan antara tahun 2021 sampai dengan 2024 ini sudah dibuat *roadmap*-nya, baik oleh Bappenas maupun oleh Kementerian Menkomar. Dengan demikian angka 600.000 di dalam Perpres yang di sebagian ditugaskan BRG untuk ikut mempercepat, ini sebetulnya kerja keroyokan Bapak-Ibu sekalian, antara nanti juga oleh Kementerian LHK, kemudian Kementerian KKP dan dan BRGM. Khusus untuk BRGM yang kami ajukan untuk Rp1,8 triliun ini sebetulnya tadi disampaikan Ibu Menteri target tahun 2021 sebetulnya 150.000 hektar. Sementara kami realistis dari lokasi yang berhasil diidentifikasi secara bersama ini luasnya adalah 83.000 hektar. Dan 83.000 hektar ini yang kami tuangkan di dalam rencana dan kebutuhan anggaran yang kami ajukan ke Kementerian Keuangan.

Bapak dan Ibu sekalian.

Terkait dengan struktur sesuai dengan Perpres 120 yang merupakan revisi dari Perpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, di situ disebutkan bahwa struktur dari BRG ini sebagian besar masih tetap, kecuali untuk Deputy Litbang. Deputy Litbang ditiadakan karena sesuai dengan kebijakan nasional, bahwa seluruh kegiatan penelitian di sentralisir di Kementerian Ristek. Kemudian Kedeputian Ristek ini diganti menjadi Deputy Pemberdayaan dan Percepatan Rehabilitasi Mangrove. Dengan demikian strukturnya tetap hanya fungsinya yang Deputy IV yang tadinya melaksanakan penelitian ini dibebani untuk melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove di 7 provinsi.

Jadi itu Bapak-Ibu sekalian, sedikit gambaran tentang BRGM. Dan kami tentu saja mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu dari seluruh Komisi IV DPR RI yang selama 5 tahun terakhir memberikan arahan dan dukungan untuk pelaksanaan BRG. Sehingga di akhir tahun 2020 Presiden akhirnya memutuskan BRG untuk diperpanjang mandatnya, kemudian ditambah tugas dengan percepatan rehabilitasi mangrove.

Saya kira itu Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Nggak sekarang gini loh, Rp1,8 triliun itu rencananya untuk apa. Tadi anda bilang semula 128 kemudian jadi 80.000, ingat loh Pak, ini sudah hampir bulan Februari akhir. Waktu anda itu nggak sampai 10 bulan, sanggup nggak nanam 80.000 hektar ini. Siapa yang mengerjakan?

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE:

83.000 hektar.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

83.000 hektar sanggup nggak, pengawasannya bagaimana, sedangkan anda tidak punya KUPT, tidak punya cabang di provinsi, 7 provinsi. Coba saya mungkin nggak paham, saya nggak ngerti masalah ini, coba berikan saya masukan, kalau bicara jangan Rp1,8 triliun, kalau ada uangnya Rp200 triliun pun saya masukkan tetapi logikanya bagaimana, nanamnya bagaimana, satu istilahnya da RKT-nya, satu bulan sampai Maret pengadaan bibitnya berapa. Bisa nggak pengadaan bibit satu bulan, dua bulan atau tiga bulan. Ini kita hitung dulu baru kita tuangkan, bukan saya nggak mendukung, saya sangat mendukung.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ijin Ketua, boleh mendukung penjelasan.

Badan Restorasi Gambut ini bekerjanya bersama UPT-UPT KLHK plus dinas Ketua. Jadi ada istilahnya tugas pembantuan, jadi dinas juga terlibat. Kemudian kalau dilihat dari pengalaman yang kemarin, ini dananya *account to account*. Jadi dari dana APBN langsung kepada masyarakat yang bekerja. Jadi seperti tadi arahan yang terhormat Ketua, bahwa ada RKT betul Ketua, karena ini melalui kelompok. Jadi UPT-UPT saya mendukung BRGM, jadi UPT-UPT KLHK bersama Dinas Lingkungan itu akan ngeroyok di masyarakat.

Yang lalu Ketua dari bulan Oktober sampai Desember, kita bisa selesaikan jadi 2 bulan kurang 17.000 hektar Ketua. Tapi itupun kalau lihat kondisi lapangannya masyarakat sebetulnya masih mengharapkan juga program ini, karena dia juga sekaligus menjadi cash forward, jadi ada peningkatan daya beli juga untuk masyarakat. Jadi orang-orang karena saya waktu *check* dilapangannya mereka pegang buku rekening bank, terus dia kasih lihat ada yang dapat berapa hari, satu hari 80.000 tergantung daerahnya ada yang 100.000, tergantung apa istilahnya upah minimum regionalnya dan lain-lain ada hitung-itungannya. Kemudian satu orang itu bisa tanah antara 80-100, jadi kira-kira polanya seperti itu Ketua, pemberdayaan masyarakat.

Terima kasih Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Sekarang begini, nanam mangrove itu bukan nanam di atas tanah. Umumnya mangrove itu hidup di lumpur, di tepi pantai bukan di pasir pantai, di tepi pantai yang berlumpur. Coba kita tengok Lampung Selatan berbatasan Lampung Timur itu, itu lumpur untuk menanam satu hari satu orang 50 pohon saja dengan menggalnya. Saya nggak menjamin bisa, kita bicara jujur.

Silakan Pak Johan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Pertama, waktu sudah lewat 5 menit Pak Ketua. Yang kedua, ini dipending saja dulu, ini anggaran cukup besar Pak Ketua. Dan macam-macam nama nomenklaturnya ini aneh-aneh Pak Ketua, ada pembibitan modern kayak apa, jangan-jangan ini mangrovenya modern Pak Ketua, bisa ditanam di pinggir pantai. Jadi dipending saja dulu Pak Ketua, satu hari atau setengah hari ini biar kita perjas ini. Pemberdayaan masyarakat inikan kedengarannya keren, tapi bagaimana bentuk pemberdayaannya. Jangan-jangan dipenanaman nanti ada pemberdayaan masyarakat, karena penanamannya lain, pendampingannya lain, pemberdayaan masyarakat juga lain. Jadi perlu kita dalami lebih dalam.

Terima kasih.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Ketua, sedikit.

KETUA RAPAT:

Ada penawaran?

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Ada sedikit Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Saya mungkin mengusulkan Ketua, inikan sebenarnya hanya usulan. Kalau saya mengusulkan tetap ada kesimpulan ini cuma nggak usah ada angkanya. Kita mendukung saja penambahan anggaran untuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, karena ini nanti jadi bahannya Ibu Menteri bicara kepada Menteri Keuangan supaya ada tambahan nanti APBN Perubahan atau ABT Ketua. Yang kita ributin ini angkanya juga belum ada,

uangnya juga belum ada. Jadi kita mendukung seperti itu angkanya nggak usah ada.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Ini dulu diselesaikan dulu.

2. Komisi IV DPR RI mendukung usulan penambahan Pagu Anggaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove TA 2021.

Bagaimana menurut Ibu Menteri, sepakat Ibu Menteri.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Ya, mendukung itu ada konsekuensi Pak Ketua. Saya tidak mau ngasih cek kosong ke Menteri. Jadi apa yang saya dukung, nggak mau saya.

KETUA RAPAT:

Bapak sama ini sama satu Fraksi loh Pak.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Ya nggak apa-apa, jangan-jangan Pak Andi sudah.... Saya nggak mau dukung.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Begini Pak Ketua, kalau saya gini, kita terima juga pendapat Bapak Johan. Jadi mendukung saya kira ini kesimpulan nanti disusulkan nanti Pak, apa kira-kira usulannya. Jadi Bapak Johan kita juga tidak menerima begitu saja, nanti LHK mengusulkan kepada Komisi IV DPR RI usulannya apa, karena uangnya juga belum ada, belum jelas juga seperti apa kita ribut sesuatu yang tidak jelas.

Terima kasih Ketua.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Betul Pak, jadi maksud saya ini ada nomenklatur pemberdayaan masyarakat Pak. Kalau dia sudah menyangkut masyarakat tidak boleh lepas dari kita Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini sudah saya lengkapi, bagaimana cocok nggak Pak Johan atau berunding dengan Poksinya dulu diluar.

2. Komisi IV DPR RI mendukung usulan penambahan Pagu Anggaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove TA 2021 yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove dengan melibatkan masyarakat.

Cocok?

Gimana setuju?

Ibu Menteri, sepakat?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih.

Setuju.

KETUA RAPAT:

Alhamdulillah.

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh Lembaga Konservasi di Indonesia. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan sanksi yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Konservasi yang terbukti melakukan kelalaian.

Ditambah kesalahan dan kelalaian.

Iya Ibu Endang, Ibu Diklat kan banyak anu referensi biasanya.

Gimana setuju?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ijin Ketua, saya mohon maaf dalam Bahasa hukum dengan istilah sanksi yang sebesar-besarnya.

KETUA RAPAT:

Seberat-beratnya.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Nggak, sebetulnya kalau yang formal sebetulnya kita bilang “sanksi yang adil”, tapi kalau mau kita bilang yang besar itu mungkin dendanya ya, misalkan begitu Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Sanksi itu kan bisa berupa hukuman maupun denda Ibu.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Atau sanksi yang tegas saja Ketua, tegas perdata maupun pidananya.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Sanksinya tegas kalau pejabatnya nggak tegas bagaimana Pak Andi, nggak kita ngomong jujur ini.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu Baya.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Tadi ada kepada lembaga konservasi mungkin jangan dihilangkan kepada lembaga konservasinya, karena selama ini memang nggak terlalu keras, lebih kencang itu arahan Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya ulangi, saya baca Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI.

3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh Lembaga Konservasi di Indonesia. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan sanksi yang tegas kepada Lembaga Konservasi yang terbukti melakukan kesalahan dan kelalaian.

Setuju, Ibu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pembinaan kepada seluruh pemegang izin industri agar terus melakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan akibat operasional industri yang dilakukannya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong seluruh pemegang izin industri untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi industri.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Ketua, ditambah Lingkungan Hidup dan Kehutanan, harus ada lengkap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETUA RAPAT:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya KLHK kurang ketik.

Anggota, setuju?

Ibu Menteri? Oh, masih runding ya.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Bisa Ketua, terima kasih.

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam pengaturan tata waktu pencairan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang disesuaikan dengan musim penghujan dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang diindikasikan dengan presentase tumbuh tanaman.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.):

Pak, usul jangan musim penghujan tapi musim tanam.

KETUA RAPAT:

Ya, setuju.

Saya memang membacanya nggak nyambung, musim tanam.

Sepakat?

Anggota setuju?

Ibu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Pimpinan, saya mohon ijin.

Sebetulnya kita nggak pernah diatur oleh Keuangan soal kapan uangnya dikeluarkan jadi tergantung rencananya KLHK sendiri saja. Jadi kalau boleh kami mohon ijin ini saya saja yang melakukan koreksi, introspeksi, dan kita akan kontrol bersama-sama Komisi IV DPR RI.

KETUA RAPAT:

Nggak pakai Depkeu ya, hapus. Nomor 5 hapus ya Ibu, internal kan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Iya, jadi KLHK saja yang dijewer saja setiap saat kalau nggak beres.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.):

Ibu Menteri, usul.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.)

Pelan-pelan Ibu, sabar Ibu, santai Ibu. Saya tahu Ibu sudah lapar mau makan tapi tunggu dulu Ibu, kita pakai Tatib Ibu ya. Jadi tadi sudah dihapus, sekarang nomor 5 jadi ini nanti Ibu Endang boleh ngomong nanti.

KETUA RAPAT:

5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun strategi dalam rangka percepatan target pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan, mulai dari proses penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan sebagai tindak lanjut pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam rangka menyelesaikan konflik tenurial yang saat ini banyak terjadi serta memberikan kepastian investasi pada usaha yang memiliki kegiatan pada areal di dalam kawasan hutan serta areal eks kawasan hutan.

Anggota?

Ibu Menteri, sepakat?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Saya mohon ijin Pimpinan, itu yang areal eks kawasan hutan, mohon dijelaskan maksudnya.

KETUA RAPAT:

Dicoret?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Iya, karena tidak ada terminologinya.

KETUA RAPAT:

Sudah cukup didalam kawasan hutan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Iya, di dalam kawasan hutan. Ini bagus sekali rekomendasi ini. Kami berterima kasih.

KETUA RAPAT:

Setuju, sepakat kan Ibu?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETJU)

6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun strategi dalam rangka percepatan target pelaksanaan pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistem, termasuk di dalamnya pengembangan wisata alam di dalam kawasan konservasi, dengan catatan tidak merusak bentang alam, yang berpotensi meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Silakan Ibu Endang.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.):

Jadi saya ingin menegaskan disini Pak, tidak ada perlindungan sumberdaya genetiknya. Nah, itu yang harus kita berikan masukan, karena selama ini kita hanya mengekspose keanekaragaman hayati. Tapi

perlindungan terhadap plasma nufahnya dan genetiknya yang tidak ada. Undang-Undangnya pun tidak ada Pak, nah ini harus kita kukuhkan dari Komisi IV DPR RI.

Terima kasih Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Nanti kita buat Undang-Undangnya ya Ibu.

KETUA RAPAT:

Masuk legislasi kita.

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri, setuju?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETJU)

7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kajian atas urgensi peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pelaksanaan tugas penjagaan kawasan hutan serta pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengajukan penambahan jumlah Polisi Hutan (Polhut) kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Itu setelah terekrut baru bicara Kesra, sudah itu nanti masuk perubahan anggaran atau anggaran 2022, ini rekomendasi rekrutmen dulu. Itu tata kelolanya begitu dalam berpemerintahan.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota) dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi terkait pencegahan dan pemberantasan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar ilegal.

Setuju, Anggota?

Sepakat Ibu?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ketua, sedikit.

Jadi yang ilegal perdagangannya, perdagangan ilegal baru tumbuhan dan satwa liar.

KETUA RAPAT:

Oh, ilegalnya loncat kebelakang.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

9. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data (baik data tabulasi maupun data spasial) atas realisasi penanaman dan potensi tegakan yang dihasilkan dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dimaksud, dan diserahkan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Rapat Kerja hari ini.

Anggota?

F-PKS (JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Dalam 3 tahun terakhir Pak Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Kalau 3 tahun, tadi Ibu Menteri mengatakan.

KETUA RAPAT:

Setuju?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Boleh nawar, karena dari 2004 kemudian ada table, ada peta, spasial, ada analisis kalau boleh 2 minggu Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya sudah, karena kalau yang terhormat memang mau reses Bu, bolehlah 2 minggu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Tawaran diterima.

Sepakat?

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

Ada yang dari Bapak Ketua belum dibacakan ini.

10. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data penggunaan dan pelepasan kawasan hutan prosedural dan non prosedural selama periode tahun 2004 s.d 2020, dan diserahkan kepada Komisi IV DPR RI dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Rapat Kerja hari ini.

Jangan seminggu kasihan beliau, ini beliau masih jadi Sekjen 2004.

Gimana, cukup kan 14 hari?

Setuju Anggota?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati.

Ada hal yang belum terjawab dengan sempurna. Tadi dari Pak Guntur dan Bu Ema. Saya minta kepada Dirjen Gakkum, coba yang 4 itu jangan

diteruskan dulu. Dilakukan pembinaan dulu, ini permintaan Mas Guntur tadi begitu. Karena dari 120 kan hanya 4, kok 4 ini termasuk orang miskin. Seandainya pengusahanya tidak miskin mestinya kalau ngambil kepalanya dulu diambil.

Pak Dirjen silakan komentar, biar puas Ibu Ema, Ibu Ema dari tadi merengut sama Pak Guntur. Karena tatapan wajahnya kok kepimpinan, cuman belum mengungkapkan saja interupsi.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Pak Ketua, mungkin sebelum dijawab itu masih ada kesimpulan yang perlu dimasukkan Pak Ketua. Sebelum menjawab tadi masalah 4 yang di Jombang.

KETUA RAPAT:

Yang mana lagi Pak Andi.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Mengenai masalah Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah dalam hal ini Kementerian KLHK untuk untuk menaikkan pagu anggaran DAK Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Jadi mungkin mendorong Pemerintah agar komunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk menaikkan pagu DAK-nya Pak. DAK ini kecil sekali Pak Rp500 miliar setahun sehingga yang didapat daerah cuma kecil.

KETUA RAPAT:

Coba redaksinya, ini minta tambahan, harus ganjil memang tadi genap 10.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Komisi IV DPR RI mendorong.

KETUA RAPAT:

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan Pagu anggaran....

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

DAK Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Jadi sebenarnya ini sebagai catatan Ibu Menteri untuk berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan, bahwa di kesimpulan rapat Komisi IV DPR RI Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Kurung tutup Bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Iya, terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Cocok Ibu redaksinya?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Anggota sepakat?

(RAPAT: SETUJU)

Silakan Ibu, saya minta *closing statement*-nya untuk menutup karena sudah tidak ada hal lagi yang perlu kita sampaikan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, jawab dulu masalah yang tadi yang 4 perusahaan itu.

KETUA RAPAT:

Ya ini, biar dijawab oleh Ibu Menteri kan bukan Dirjen yang jawab, kecuali Ibu Menteri memerintahkan Dirjen untuk menjawab.

Silakan Ibu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Saya akan cek dan itu pasti ada prosedurnya juga untuk mengatasi Ibu. Jadi Bapak Dirjen, tolong kita dalam saya kira habis ini atau besok.

KETUA RAPAT:

Jombang TKP-nya Ibu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Jombang yang 4 itu dan itu ada tata caranya juga Pak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota yang kami hormati. Prinsip saya perhatikan untuk kita selesaikan.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh yang terhormat Anggota Komisi IV DPR RI dan terutama Pimpinan, yang terhormat Pimpinan Komisi IV DPR RI, atas dukungan, catatan. Dan saya kira harapan yang begitu besar, sehingga kami juga terdorong untuk terus-menerus memperbaiki kinerja Kementerian.

Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salom,

Om Shanti Shanti Shanti Om.

KETUA RAPAT:

Rapat Kerja pada hari ini telah berakhir dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobil'amin*. Manakala Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI ada salah, khilaf, atau tutur kata yang berkenan termasuk rapat-rapat sebelumnya, itu bukan semata-mata menghujat, tapi sebagai Tupoksi fungsi pengawasan, keras bukan benci, tapi bagaimana yang mulai akan bengkok diluruskan oleh Pak Ketua dan segenap Pimpinan serta Anggota Komisi IV DPR RI. Mohon maaf lahir dan batin, semoga hikmah dan kinerja KLHK ini tetap dalam lindungan Allah SWT.

Wallahu Muwafiq Ila Aqwamith Thariq,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.30 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Achmad Agus Thomy
NIP.196508171988031002